



KABUPATEN MOJOKERTO



LAPORAN
AKHIR

GRAND DESIGN

PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN
KABUPATEN MOJOKERTO



KATA PENGANTAR

Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Kabupaten Mojokerto merupakan dokumen yang disusun oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto tentang rencana pembangunan kependudukan Kabupaten Mojokerto kedepan. Dokumen ini disusun bertujuan untuk mencapai kualitas penduduk Kabupaten Mojokerto yang tinggi sehingga mampu menjadi faktor penting dalam mencapai kemajuan bangsa. Sesuai dengan arahan pemerintah pusat yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 153 Tahun 2014 tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (GDPK) untuk mencapai visi Indonesia dalam bidang kependudukan yaitu “Terwujudnya penduduk yang berkualitas sebagai model pembangunan untuk mencapai Indonesia yang mandiri, maju, adil dan sejahtera”.

Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Kabupaten Mojokerto ini berisi tentang kondisi kependudukan saat ini, kondisi kependudukan yang diinginkan, pokok-pokok pembangunan kependudukan, dan *roadmap* pembangunan kependudukan yang direncanakan Kabupaten Mojokerto. Tidak hanya dari ditinjau dari segi kuantitas penduduk tapi juga ditinjau dari segi kualitas penduduk; pembangunan keluarga; persebaran dan mobilitas penduduk; serta data dan informasi kependudukan.

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto berharap dengan adanya dokumen ini dapat menjadi acuan dalam pembangunan kependudukan di Kabupaten Mojokerto serta perencanaan ini dapat berjalan sesuai dengan *grand design* yang telah disusun.

Mojokerto, November 2020

Penyusun



DAFTAR ISI

COVER	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Maksud dan Tujuan	5
1.3 Sasaran	6
BAB 2 KONDISI KEPENDUDUKAN SAAT INI	8
2.1 Kuantitas Penduduk	9
2.2 Kualitas Penduduk	17
2.3 Pembangunan Keluarga	27
2.4 Persebaran dan Mobilitas Penduduk	33
2.5 Data dan Informasi Kependudukan	36
BAB 3 KONDISI YANG DIINGINKAN	38
3.1 Kuantitas Penduduk	39
3.2 Kualitas Penduduk	40
3.3 Kondisi Keluarga	40
3.4 Persebaran dan Mobilitas Penduduk	41
3.5 Data dan Informasi Kependudukan	42
3.6 Permasalahan dan Tantangan	43
BAB 4 POKOK – POKOK PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN	47
4.1 Pengendalian Kuantitas Penduduk	48
4.2 Peningkatan Kualitas Penduduk	50
4.3 Strategi Pembangunan Keluarga	53
4.4 Pengarahan Mobilitas Penduduk	55
4.5 Pembangunan Sistem Data dan Informasi Kependudukan	57
BAB 5 ROADMAP PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN	59
5.1 Pengendalian Kuantitas Penduduk	60
5.2 Peningkatan Kualitas Penduduk	62



5.3	Pembangunan Keluarga.....	64
5.4	Pengarahannya Mobilitas Penduduk.....	65
5.5	Pembangunan Sistem Data dan Informasi Kependudukan	68
BAB 6	PENUTUP	70



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah Penduduk Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2019.....	10
Tabel 2.2 Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Mojokerto Berdasarkan Kecamatan Tahun 2019	10
Tabel 2.3 Jumlah Penduduk Kabupaten Mojokerto Berdasarkan Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2019	13
Tabel 2.4 Jumlah Peserta KB Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 - 2019	15
Tabel 2.5 Jumlah PUS Berdasarkan Kecamatan Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 - 2019	16
Tabel 2.6 Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Mojokerto Tahun 2019.....	29
Tabel 2.7 UPPKS Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 – 2019	30
Tabel 2.8 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan di Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2019.....	31
Tabel 2.9 Migrasi Berdasarkan Kecamatan Penduduk Kabupaten Mojokerto Tahun 2019	36
Tabel 5.1 Roadmap Grand Design Pengendalian Kuantitas Penduduk.....	60
Tabel 5.2 Roadmap Rata-Rata Lama Sekolah	63
Tabel 5.3 Roadmap Angka Partisipasi Murni	63
Tabel 5.4 Roadmap Angka Harapan Hidup.....	64
Tabel 5.5 Roadmap Pembangunan Keluarga.....	64
Tabel 5.6 Roadmap Pengarahan Mobilitas Penduduk	67
Tabel 5.7 Roadmap Pembangunan Sistem Data dan Informasi Kependudukan..	68
Tabel 5.1 Roadmap Grand Design Pengendalian Kuantitas Penduduk.....	60
Tabel 5.2 Roadmap Rata-Rata Lama Sekolah	63
Tabel 5.3 Roadmap Angka Partisipasi Murni	63
Tabel 5.4 Roadmap Angka Harapan Hidup.....	64
Tabel 5.5 Roadmap Pembangunan Keluarga.....	64
Tabel 5.6 Roadmap Pengarahan Mobilitas Penduduk	67
Tabel 5.7 Roadmap Pembangunan Sistem Data dan Informasi Kependudukan..	68



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2019...	9
Gambar 2.2	Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 dan Tahun 2019	12
Gambar 2.3	Rasio Ketergantungan Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2019.....	14
Gambar 2.4	Jumlah Peserta KB, Jumlah PUS dan Persentase Peserta Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 - 2019	15
Gambar 2.5	Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 - 2019	17
Gambar 2.6	Angka Partisipasi Murni Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 - 2019	18
Gambar 2.7	Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 - 2019	19
Gambar 2.8	Angka Melek Huruf Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 - 2019	20
Gambar 2.9	Angka Kematian Bayi Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 - 2019	21
Gambar 2.10	Angka Kematian Ibu Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 - 2019	22
Gambar 2.11	Balita Gizi Buruk Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 - 2019	23
Gambar 2.12	Balita Gizi Kurang Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 - 2019	24
Gambar 2.13	Stunting Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 - 2019	24
Gambar 2.14	Angka Harapan Hidup Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 - 2019 .	25
Gambar 2.15	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 - 2019	26
Gambar 2.16	Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 – 2019	27
Gambar 2.17	Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 – 2019	28
Gambar 2.18	Kepadatan Penduduk Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2019....	33
Gambar 2.19	Kepadatan Penduduk Berdasarkan Kecamatan Kabupaten Mojokerto 2019	34
Gambar 2.20	Migrasi Penduduk Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2019	35
Gambar 2.21	Website Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto	37
Gambar 3.1	Gambar Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2019.....	45
Gambar 3.2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2019.....	46



BAB 1

PENDAHULUAN



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kabupaten Mojokerto merupakan salah satu kabupaten yang terletak di provinsi Jawa Timur, kabupaten ini dikenal sebagai daerah yang dulunya adalah kerajaan Majapahit. Saat ini penduduk Kabupaten Mojokerto mencapai 1.159.593 jiwa berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto pada tahun 2020. Jika melihat data lima tahun terakhir, jumlah penduduk Kabupaten Mojokerto pada tahun 2016 sebanyak 1.117.404 jiwa, peningkatan jumlah penduduk dari lima tahun terakhir sebesar 3,77 persen. Berdasarkan data kependudukan tersebut perlu adanya usaha pemerintah untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk sebenarnya merupakan keseimbangan dinamis antara dua kekuatan yang menambah atau yang mengurangi jumlah penduduk. Perkembangan penduduk akan dipengaruhi oleh jumlah bayi yang lahir tetapi secara bersamaan pula akan dikurangi oleh jumlah kematian yang dapat terjadi pada semua golongan umur. Dalam konteks spasial, mobilitas penduduk juga berpengaruh terhadap perubahan dalam jumlah penduduk, imigrasi akan menambah jumlah penduduk dan emigrasi akan mengurangi jumlah penduduk dalam suatu wilayah.

Persoalan kependudukan yang dihadapi kebanyakan wilayah di Indonesia menjadi lebih kompleks karena selain masalah kuantitas, juga dihadapkan pada persoalan kualitas penduduk baik pada bidang pendidikan, kesehatan,



kesejahteraan, maupun pemerataan ekonomi. Maka dari itu diperlukan respon kebijakan terhadap persoalan kependudukan yang terarah dan terencana untuk mencapai keberhasilan pembangunan kependudukan. Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 153 Tahun 2014 tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (GDPK) untuk mencapai visi Indonesia dalam bidang kependudukan yaitu “Terwujudnya penduduk yang berkualitas sebagai model pembangunan untuk mencapai Indonesia yang mandiri, maju, adil dan sejahtera”. Mengacu pada hal tersebut dilaksanakanlah penyusunan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (GDPK) Kabupaten Mojokerto.

Untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut di atas, diperlukan suatu acuan bagi pembangunan kependudukan di masa mendatang, baik dari sisi kebijakan umum dalam bentuk *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (GDPK) dengan berbagai pencapaian target. Penyusunan dokumen ini merupakan tindak lanjut atau operasionalisasi Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Penyusunan bentuk *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (GDPK) ini sesuai dengan GDPK Indonesia yang memiliki visi dan misi yakni :

Visi :

“Terwujudnya penduduk yang berkualitas sebagai modal pembangunan untuk mencapai Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan sejahtera”



Misi :

1. Menempatkan aspek kependudukan sebagai titik sentral pembangunan dan mengintegrasikan kebijakan kependudukan ke dalam kebijakan pembangunan sosial budaya, ekonomi, dan lingkungan hidup
2. Mendorong tercapainya jejaring (*networking*) kebijakan antar pemangku kepentingan di tingkat pusat maupun daerah dalam membangun tata kelola kependudukan untuk mendukung terciptanya pembangunan berkelanjutan
3. Menciptakan sinkronisasi antar berbagai peraturan perundangan dan kebijakan pemerintah di tingkat pusat dan daerah tentang kependudukan
4. Memfasilitasi perkembangan kependudukan kearah yang seimbang antara jumlah, struktur, dan persebaran penduduk dengan lingkungan hidup, baik yang berupa daya dukung alam maupun daya tampung lingkungan serta kondisi perkembangan sosial dan budaya
5. Mengintegrasikan kegiatan ekonomi secara sinergis antara wilayah pertumbuhan dengan wilayah pedesaan menjadi suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi yang mapu menarik gerak keruangan penduduk yang aman, nyaman, cepat, dan terjangkau
6. Membangun potensi dan sinergi aktor kependudukan, baik pada level individu, keluarga maupun masyarakat untuk meningkatkan kualitas penduduk yang mendukung pembangunan berkelanjutan



7. Membangun keluarga yang sejahtera, sehat, maju, mandiri, dan harmonis yang berkeadilan dan berkesetaraan gender serta mampu merencanakan sumber daya keluarga dan jumlah anak yang ideal
8. Mewujudkan migrasi tenaga kerja internal dan internasional secara terarah, tertib, teratur, dan terlindungi
9. Membuka peningkatan partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan dan membangun tata kelola kependudukan yang terpusat pada manusia, termasuk membangun sistem informasi dan data kependudukan yang transparan dan akuntabel
10. Membangun kesadaran sikap dan kebijakan bagi kesamaan hak dan kewajiban antarkelompok, termasuk kesadaran gender bagi terciptanya kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang demi tercapainya tujuan-tujuan pembangunan.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dari pelaksanaan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (GDPK) Kabupaten Mojokerto adalah tercapainya kualitas penduduk Kabupaten Mojokerto yang tinggi sehingga mampu menjadi faktor penting dalam mencapai kemajuan bangsa.

Tujuan dilakukan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (GDPK) Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut :

1. Penduduk Kabupaten Mojokerto tumbuh seimbang



2. Penduduk Kabupaten Mojokerto yang sehat jasmani dan rohani, cerdas, mandiri, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan memiliki etos kerja yang tinggi
3. Keluarga Kabupaten Mojokerto yang berketahanan, sejahtera, sehat, maju, mandiri, dan harmoni
4. Keseimbangan persebaran penduduk Kabupaten Mojokerto yang serasi dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan
5. Administrasi Kependudukan Kabupaten Mojokerto yang tertib, akurat, dan dapat dipercaya.

1.3 Sasaran

Sasaran pelaksanaan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (GDPK) Kabupaten Mojokerto adalah penduduk Kabupaten Mojokerto.

1. Terwujudnya pembangunan pembangunan berwawasan kependudukan yang berdasarkan pada pendekatan hak asasi untuk meningkatkan kualitas penduduk dalam rangka mencapai pembangunan berkelanjutan
2. Pencapaian *windows of opportunity* melalui pengelolaan kuantitas penduduk dengan cara mpengendalian angka kelahiran, penurunan angka kematian, dan pengarahannya mobilitas penduduk
3. Keluarga berkualitas yang memiliki ciri ketahanan sosial, ekonomi, budaya tinggi serta mampu merencanakan sumber daya keluarga secara optimal



4. Pembangunan *database* kependudukan melalui pengembangan sistem informasi data kependudukan yang akurat, dapat dipercaya, dan terintegrasi.



BAB 2

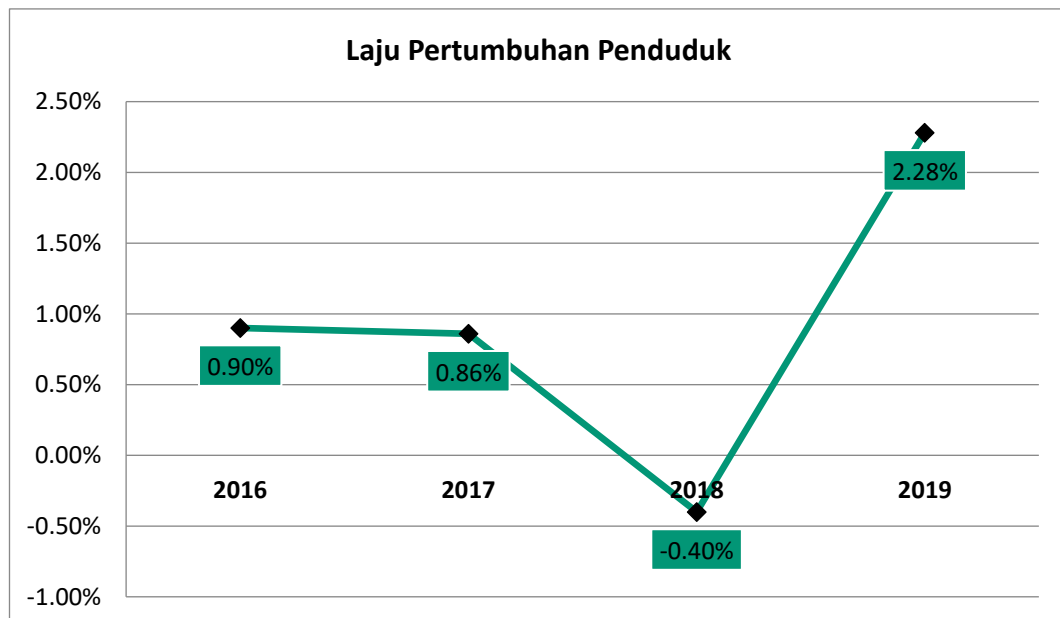
KONDISI KEPENDUDUKAN SAAT INI

BAB 2**KONDISI KEPENDUDUKAN SAAT INI****2.1 Kuantitas Penduduk**

Kondisi Kependudukan Kabupaten Mojokerto saat ini akan dilihat berdasarkan pertumbuhan penduduk, komposisi penduduk, rasio ketergantungan dan kinerja program KB.

Pertumbuhan Penduduk

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2016 hingga 2019 memperlihatkan bahwa selama 4 tahun terakhir pertumbuhan penduduk Kabupaten Mojokerto mengalami penurunan dan kenaikan yang cukup signifikan.



Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto

Gambar 2.1 Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2019



Berdasarkan Gambar 2.1 pada tahun 2016 laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,90%, laju pertumbuhan pada tahun 2017 menurun dibanding tahun sebelumnya sebesar 0,86%. Namun, pada tahun 2018 terjadi perubahan cukup signifikan yaitu jumlah penduduk menurun dari tahun sebelumnya sehingga laju pertumbuhannya bernilai negatif dibanding tahun sebelumnya sebesar -0,40%, dan pada tahun 2019 terjadi kenaikan jumlah penduduk cukup signifikan dari tahun sebelumnya dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 2,28%. Dalam konteks kebijakan kebijakan kependudukan, hal ini harus menjadi perhatian tersendiri.

Tabel 2.1 Jumlah Penduduk Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2019

Tahun	Jumlah Penduduk
2016	1.117.405
2017	1.138.261
2018	1.133.783
2019	1.159.593

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto

Berikut laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Mojokerto berdasarkan Kecamatan pada tahun 2019 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.2 Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Mojokerto Berdasarkan Kecamatan Tahun 2019

NO	KECAMATAN	Jumlah Penduduk Tahun 2018	Jumlah Penduduk Tahun 2019	Laju Pertumbuhan Tahun 2019
1	JATIREJO	23.246	22.481	2,46%
2	GONDANG	22.620	22.285	2,15%
3	PACET	30.618	30.322	2,23%
4	TRAWAS	15.890	15.891	2,12%
5	NGORO	42.830	42.761	2,66%
6	PUNGGING	40.812	40.375	2,07%
7	KUTOREJO	34.346	33.453	2,46%
8	MOJOSARI	41.200	40.606	2,20%
9	DLANGGU	29.444	28.994	2,54%
10	BANGSAL	27.004	26.532	2,18%

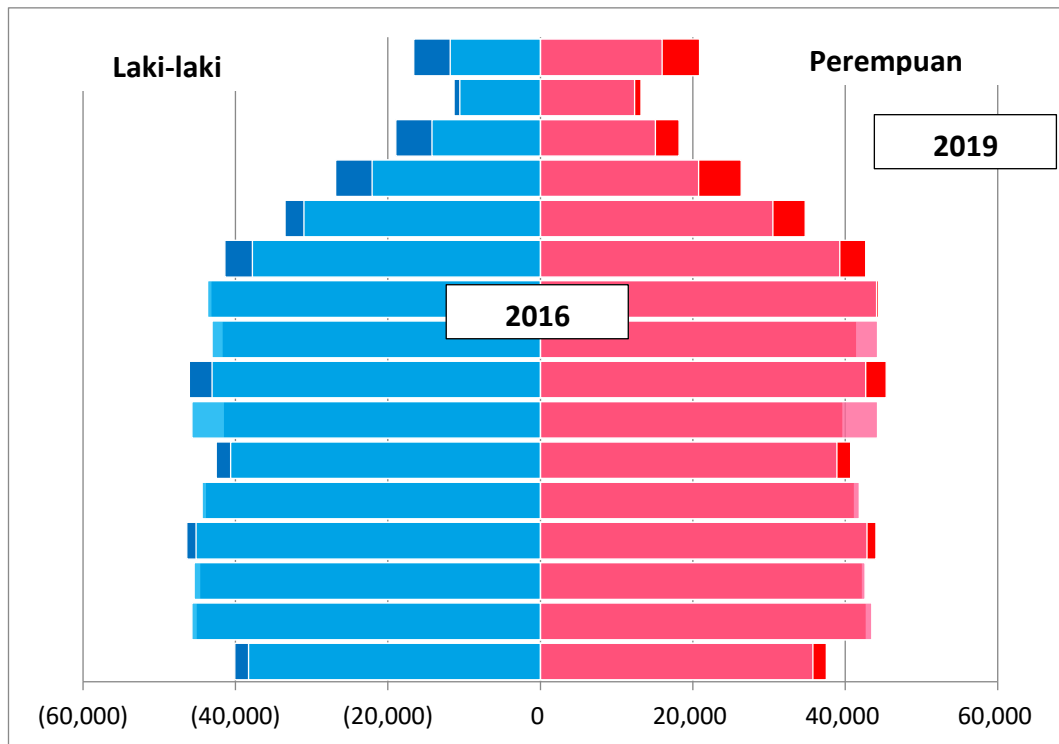


NO	KECAMATAN	Jumlah Penduduk Tahun 2018	Jumlah Penduduk Tahun 2019	Laju Pertumbuhan Tahun 2019
11	PURI	40.108	39.379	2,63%
12	TROWULAN	39.485	38.396	2,31%
13	SOOKO`	37.904	37.318	2,56%
14	GEDEG	30.339	30.171	1,39%
15	KEMLAGI	30.808	30.616	1,92%
16	JETIS	45.103	43.493	2,11%
17	DAWARBLANDONG	26.522	26.832	1,42%
18	MOJOANYAR	25.930	25.479	2,23%
	Kabupaten Mojokerto	584.209	575.384	2,23%

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto

Komposisi Penduduk

Dari sisi komposisi penduduk, telah terjadi perubahan penduduk selama tahun 2016 hingga 2019. Gambar 2.2 memperlihatkan bahwa tahun 2016 bentuk piramida penduduk Kabupaten Mojokerto termasuk tipe stasioner. Hal ini ditandai dengan bagian dasar (kelompok anak-anak) yang hampir seimbang dengan bagian atasnya (kelompok dewasa). Sedangkan pada tahun 2019 bentuk piramida ini tidak berubah signifikan, hanya saja sebagian besar kelompok usia mengalami pelebaran. Penduduk Kabupaten Mojokerto dapat dikategorikan sebagai penduduk tua karena memiliki umur median sebesar 33,7 tahun, yaitu pemusatan penduduk terjadi pada kelompok umur 30 – 34 tahun.



Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto

Gambar 2.2 Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 dan Tahun 2019

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil jumlah penduduk Kabupaten Mojokerto pada 2019 mencapai 1.159.593 jiwa. Jumlah tersebut terdiri dari 584.209 jiwa laki-laki dan 575.384 jiwa perempuan. Menurut kelompok umur, penduduk yang masih tergolong anak-anak (0-14 tahun) mencapai 252.524 jiwa atau sekitar 21,77% dari total populasi pada tahun tersebut. Untuk populasi yang masuk kategori usia produktif (14-64 tahun) 807.853 jiwa (69,67%) dan penduduk usia lanjut 65 ke atas sebanyak 99.216 jiwa (8,56%). Berikut merupakan rincian jumlah penduduk berdasarkan kecamatan dan jenis kelamin pada tahun 2019.

**Tabel 2.3** Jumlah Penduduk Kabupaten Mojokerto Berdasarkan Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2019

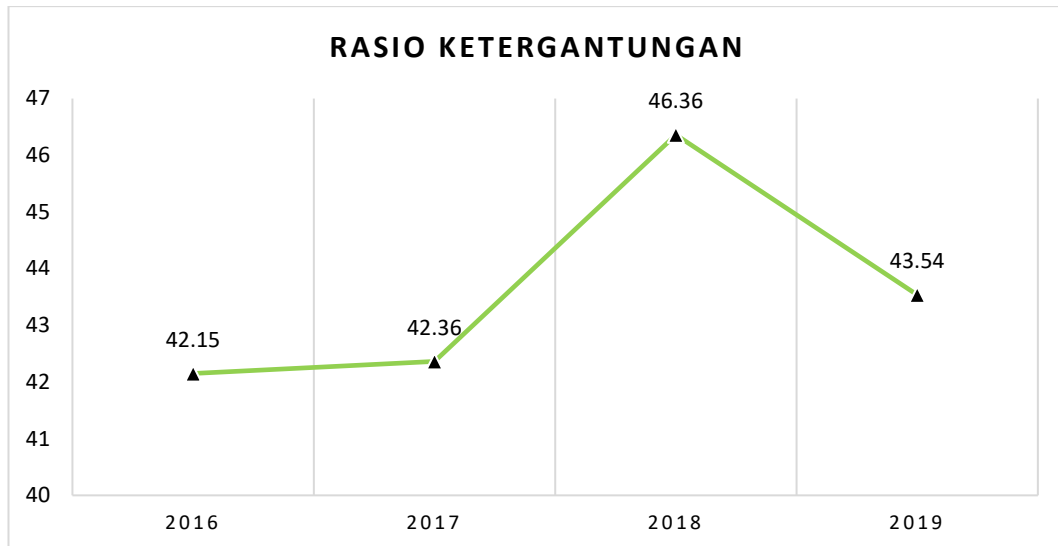
NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK 2019		
		L	P	JUMLAH
1	JATIREJO	23.246	22.481	45.727
2	GONDANG	22.620	22.285	44.905
3	PACET	30.618	30.322	60.940
4	TRAWAS	15.890	15.891	31.781
5	NGORO	42.830	42.761	85.591
6	PUNGGING	40.812	40.375	81.187
7	KUTOREJO	34.346	33.453	67.799
8	MOJOSARI	41.200	40.606	81.806
9	DLANGGU	29.444	28.994	58.438
10	BANGSAL	27.004	26.532	53.536
11	PURI	40.108	39.379	79.487
12	TROWULAN	39.485	38.396	77.881
13	SOOKO	37.904	37.318	75.222
14	GEDEG	30.339	30.171	60.510
15	KEMLAGI	30.808	30.616	61.424
16	JETIS	45.103	43.493	88.596
17	DAWARBLANDONG	26.522	26.832	53.354
18	MOJOANYAR	25.930	25.479	51.409
	Kabupaten Mojokerto	584.209	575.384	1.159.593

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto

Rasio Ketergantungan

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2016 tercatat rasio ketergantungan Kabupaten Mojokerto sebesar 42,15 yang menunjukkan setiap 100 penduduk produktif menanggung 42,15 penduduk tidak produktif yang terdiri dari lansia dan anak-anak. Angka tersebut naik menjadi 42,36 pada tahun 2017, dan meningkat signifikan menjadi 46,36 pada tahun 2018. Kemudian pada tahun 2019 rasio ketergantungan menurun menjadi 43,54. Perubahan dari tahun 2016 hingga tahun 2017 menggambarkan bahwa kenaikan jumlah penduduk tidak produktif lebih besar dibandingkan kenaikan jumlah penduduk usia produktif, namun pada tahun 2018 terdapat pengecualian dimana

jumlah penduduk usia produktif mengalami penurunan yang cukup signifikan. Hal ini diduga akibat tingginya angka kematian di usia produktif.



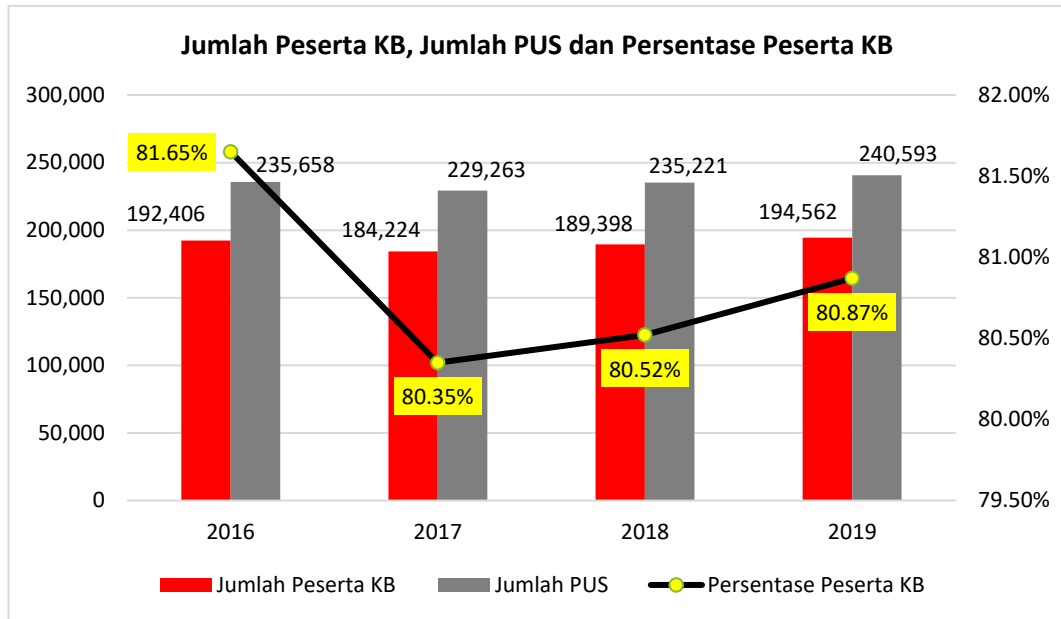
Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto, diolah

Gambar 2.3 Rasio Ketergantungan Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2019

Keadaan yang diharapkan adalah dimana Kabupaten Mojokerto mencapai fase ketika rasio ketergantungan mencapai titik terendah, yang disebut dengan *windows of opportunity*.

Kinerja Program KB

Program Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu usaha pemerintah agar masyarakat yang sejahtera dengan cara mengendalikan kelahiran sekaligus dalam rangka menjamin terkendalinya pertumbuhan penduduk Indonesia. Penduduk Kabupaten Mojokerto yang ikut serta dalam program tersebut cukup banyak, pada tahun 2016 persentase peserta KB sebanyak 81,65%; tahun 2017 turun menjadi 80,35%; tahun 2018 naik kembali menjadi 80,52%; dan pada tahun 2019 menjadi 80,87%. Persentase peserta KB pada tahun 2019 sudah meningkat dari dua tahun sebelumnya, namun tidak lebih tinggi dari persentase peserta KB pada tahun 2016.



Sumber : Dinas P2KBP2 Kabupaten Mojokerto

Gambar 2.4 Jumlah Peserta KB, Jumlah PUS dan Persentase Peserta Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 - 2019

Berikut jumlah peserta KB berdasarkan kecamatan di Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2019 disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.4 Jumlah Peserta KB Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 - 2019

No	Kecamatan	Jumlah Peserta KB			
		2016	2017	2018	2019
1	JATIREJO	6.369	6.249	6.272	6.627
2	GONDANG	7.901	7.570	7.754	7.952
3	PACET	10.849	10.595	10.016	10.275
4	TRAWAS	6.430	5.875	6.216	6.347
5	NGORO	13.958	12.933	13.486	13.873
6	PUNGGING	14.788	13.789	14.801	15.610
7	KUTOREJO	11.794	10.717	11.705	11.823
8	MOJOSARI	13.040	12.849	12.900	13.970
9	DLANGGU	9.464	8.866	9.009	9.185
10	BANGSAL	8.331	8.077	8.280	8.288
11	PURI	12.633	12.534	12.878	12.729
12	TROWULAN	11.760	11.776	12.040	12.373
13	SOOKO	11.281	10.901	11.283	11.460
14	GEDEG	11.843	12.258	12.614	12.792
15	KEMLAGI	9.164	9.286	9.691	9.820



No	Kecamatan	Jumlah Peserta KB			
		2016	2017	2018	2019
16	JETIS	14.022	12.804	13.344	13.670
17	DAWARBLNDONG	11.568	10.241	9.717	10.223
18	MOJOANYAR	7.211	6.904	7.392	7.545
	Kabupaten Mojokerto	192.406	184.224	189.398	194.562

Sumber : Dinas P2KBP2 Kabupaten Mojokerto

Berikut jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) berdasarkan kecamatan di Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2019 disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.5 Jumlah PUS Berdasarkan Kecamatan Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 - 2019

No	Kecamatan	Jumlah PUS			
		2016	2017	2018	2019
1	JATIREJO	7.946	8.001	7.903	8.343
2	GONDANG	9.398	9.452	9.632	9.763
3	PACET	13.160	12.845	12.564	12.755
4	TRAWAS	7.795	7.417	7.642	7.746
5	NGORO	16.886	16.096	16.510	16.976
6	PUNGGING	18.019	17.550	18.510	19.558
7	KUTOREJO	14.651	13.735	14.139	14.500
8	MOJOSARI	16.172	15.696	16.171	16.788
9	DLANGGU	11.926	11.117	11.314	11.542
10	BANGSAL	10.303	10.200	10.363	10.319
11	PURI	15.201	15.331	15.926	15.610
12	TROWULAN	14.518	14.670	14.986	15.345
13	SOOKO	13.772	13.704	14.218	14.455
14	GEDEG	14.405	14.805	15.518	15.874
15	KEMLAGI	11.229	11.240	11.603	11.845
16	JETIS	17.344	16.354	17.001	17.156
17	DAWARBLNDONG	13.789	12.093	11.856	12.640
18	MOJOANYAR	9.144	8.957	9.365	9.378
	Kabupaten Mojokerto	235.658	229.263	235.221	240.593

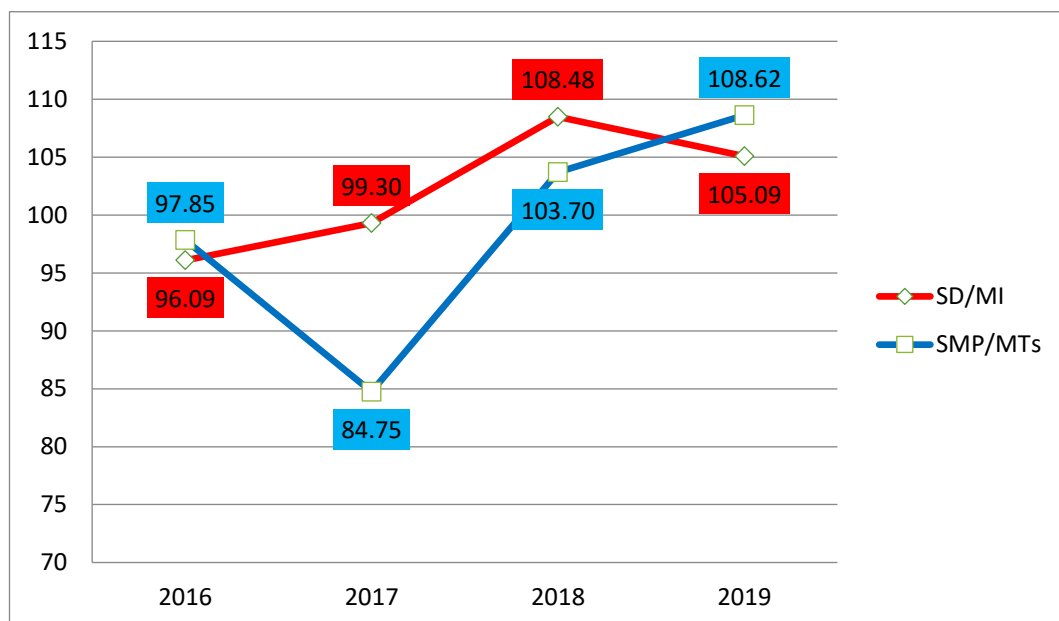
Sumber : Dinas P2KBP2 Kabupaten Mojokerto

2.2 Kualitas Penduduk

Selain melihat kondisi kependudukan berdasarkan kuantitas, perlu juga dibahas kondisi kependudukan berdasarkan kualitasnya meliputi aspek pendidikan dan kesehatan.

Pendidikan

Angka Partisipasi Sekolah



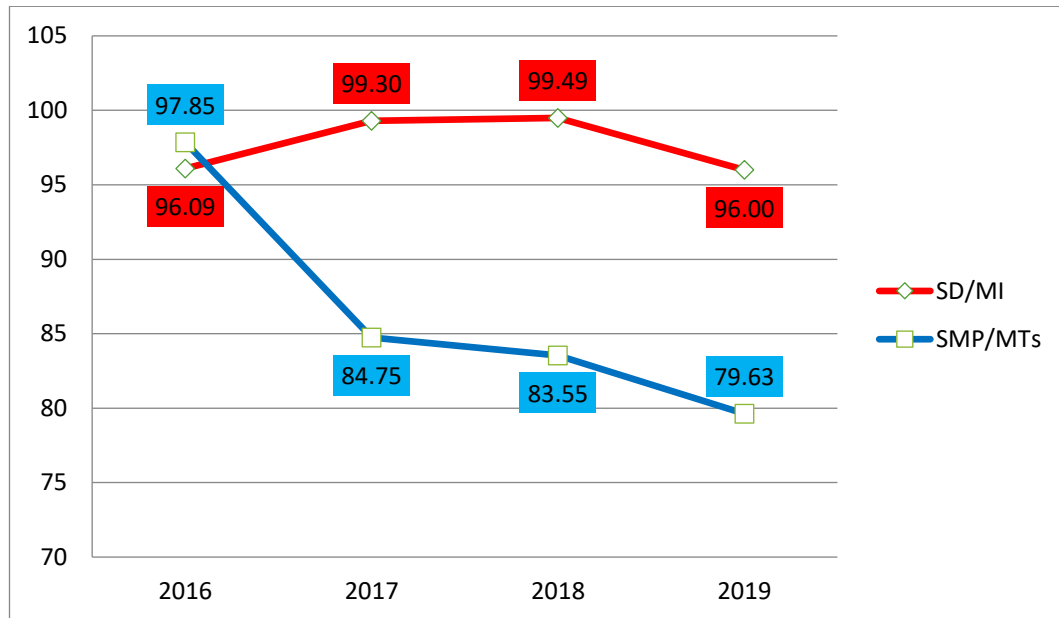
Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto

Gambar 2.5 Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 - 2019

Data Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI di Kabupaten Mojokerto pada tahun 2016 hingga tahun 2019 mengalami kenaikan angka dari 96,09 pada tahun 2016 dan menjadi 105,09 pada tahun 2019, namun pada tahun 2018 angka tersebut sempat mencapai 108,48. Sedangkan APK SMP/MTs pada tahun 2016 mencapai 97,85 kemudian mengalami penurunan menjadi 84,75 pada tahun 2017 dan mengalami kenaikan hingga tahun 2019 menjadi 108,62. APK mengukur tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat



pendidikan. APK SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Mojokerto menunjukkan bahwa tingkat partisipasi penduduk Kabupaten Mojokerto dalam pendidikan SD/MI dan SMP/MTs sudah baik dengan angka mencapai 100.



Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto

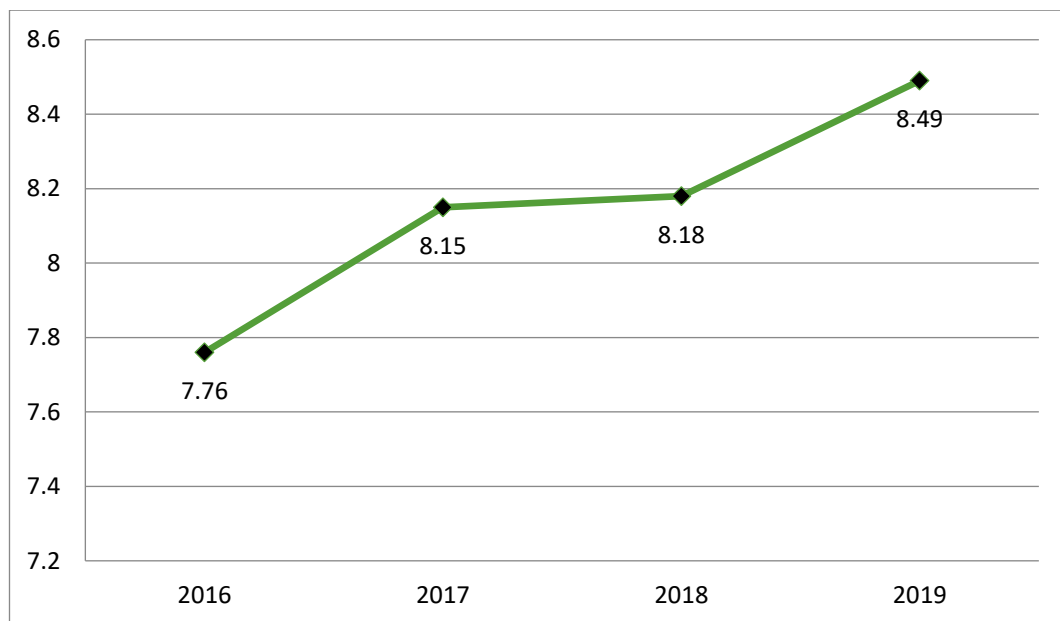
Gambar 2.6 Angka Partisipasi Murni Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 - 2019

Sedangkan jika dilihat dari data Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI pada tahun 2016 hingga tahun 2019 angkanya mengalami kenaikan dan penurunan. Pada tahun 2016 APM sebesar 96,09 mengalami kenaikan hingga mencapai 99,49 pada tahun 2018, kemudian nilainya turun pada tahun 2019 menjadi 96. Sedangkan APM pada jenjang SMP/MTs dari tahun 2016 hingga tahun 2019 mengalami penurunan, pada tahun 2016 angkanya mencapai 97,85 mengalami penurunan tiap tahunnya sehingga pada tahun 2019 angkanya menjadi 79,63. APM menunjukkan partisipasi penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. Dengan nilai yang kurang dari 100 dapat diketahui bahwa partisipasi penduduk usia 7-12 tahun di tingkat pendidikan SD/MI dan penduduk

usia 13-15 tahun di tingkat pendidikan SMP/MTs masih belum terserap hal tersebut dapat dikarenakan partisipasi siswa yang terlambat masuk ke bangku sekolah maupun siswa terlalu dini untuk duduk di bangku sekolah.

Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Diasumsikan bahwa dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun. Cakupan penduduk yang dihitung dalam penghitungan rata-rata lama sekolah adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas.



Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto

Gambar 2.7 Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 - 2019

Berdasarkan data Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Mojokerto tahun 2016 hingga 2019 diketahui bahwa Rata-Rata Lama sekolah nilainya selalu naik. Sehingga pada tahun 2019 sebesar 8,49 tahun, meningkat sebesar 0,76 tahun

dari tahu 2016. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin tingginya kesadaran masyarakat Kabupaten Mojokerto akan pentingnya pendidikan.

Angka Melek Huruf



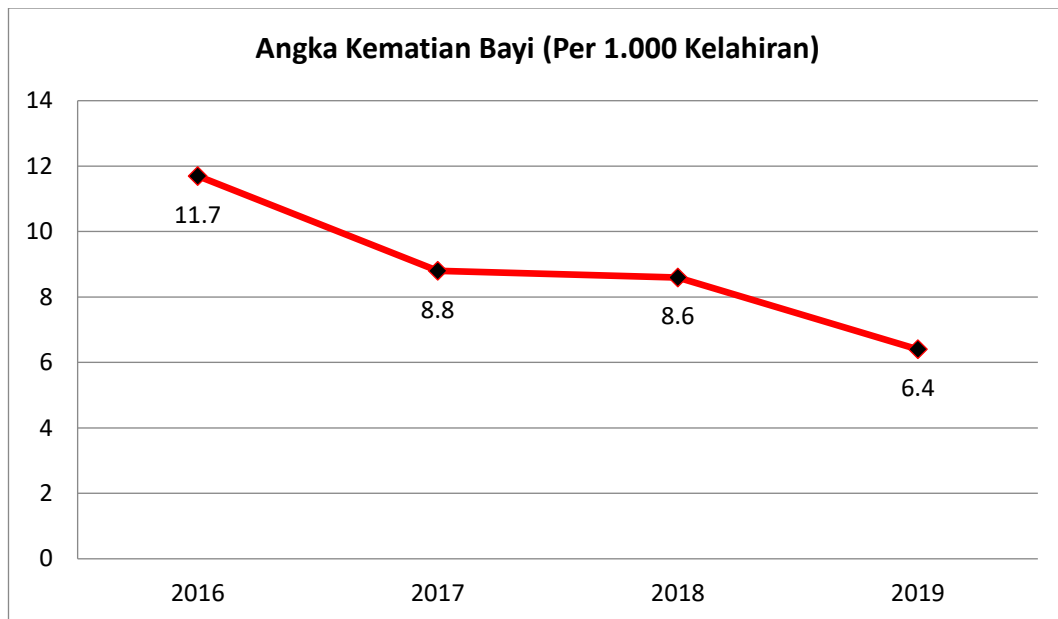
Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto

Gambar 2.8 Angka Melek Huruf Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 - 2019

Berdasarkan data Angka Melek Huruf Kabupaten Mojokerto tahun 2016 hingga 2019 diketahui bahwa nilainya sebesar 100% dari tahun ke tahun, Sehingga dapat diketahui bahwa penduduk Kabupaten Mojokerto usia 15 tahun ke atas telah mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya.

Kesehatan

Kualitas penduduk dilihat dari segi kesehatan melalui indikator Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Ibu (AKI), gizi kurang, stunting, Angka Harapan Hidup (AHH), Rata-rata Pengeluaran per Kapita, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

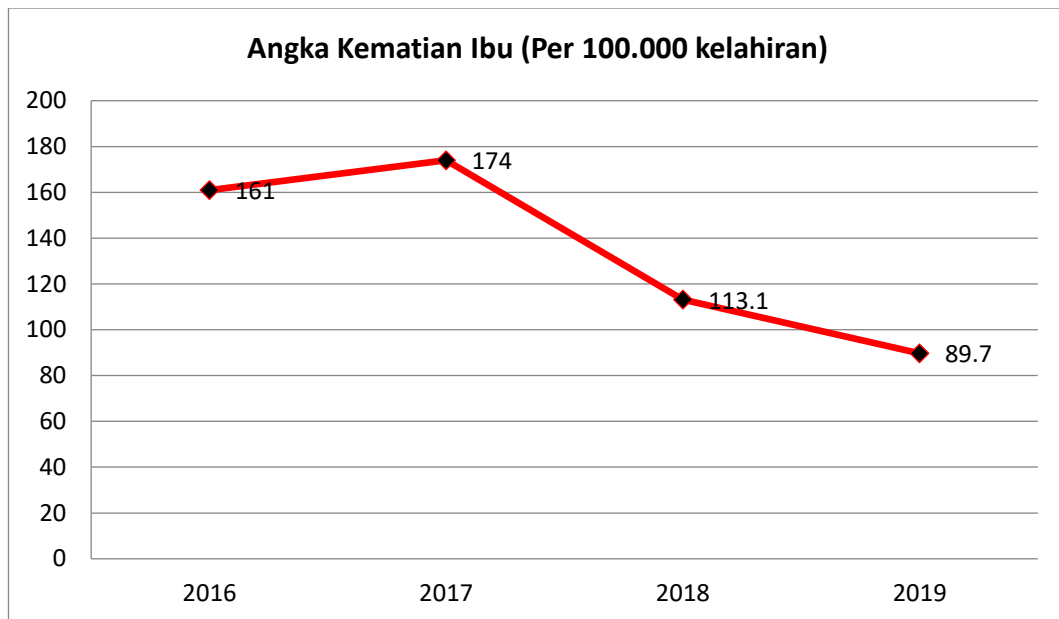
Angka Kematian Bayi

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto

Gambar 2.9 Angka Kematian Bayi Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 - 2019

Angka Kematian Bayi (AKB) Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 hingga 2019 mengalami penurunan per tahun. Dalam periode tahun 2016 hingga tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 5,3. Pada tahun 2016 angka kematian bayi sebesar 11,7 bayi setiap 1.000 kelahiran bayi, kemudian menurun hingga pada tahun 2019 angka kematian bayi sebesar 6,4 bayi setiap 1.000 kelahiran bayi. Dalam kurun waktu tersebut, secara rata-rata angka kematian bayi sebesar 1,76 atau setiap tahun pemerintah berhasil menurunkan angka kematian bayi sekitar 1-2 bayi per tahun dari 1.000 kelahiran bayi. Ini menunjukkan bahwa adanya perbaikan kualitas kesehatan di Kabupaten Mojokerto.

Angka Kematian Ibu



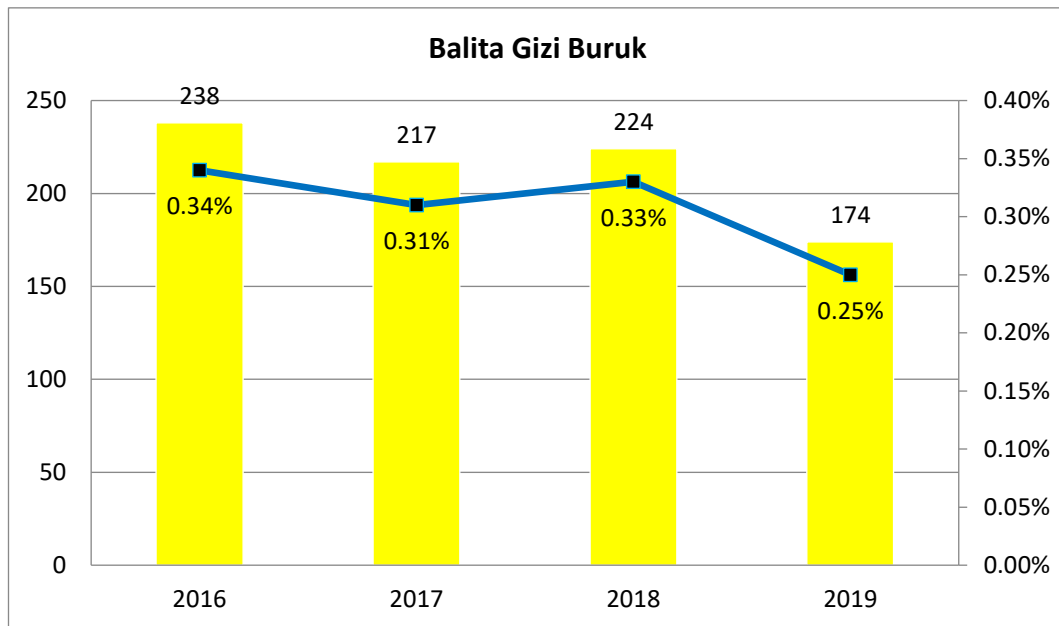
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto

Gambar 2.10 Angka Kematian Ibu Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 - 2019

Sedangkan Angka Kematian Ibu (AKI) Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 sebesar 161, yang artinya terdapat 161 kematian ibu dari 100.000 kelahiran. Kemudian pada tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 174 kematian ibu dari 100.000 kelahiran. Selanjutnya pada tahun 2018 dan 2019 mengalami penurunan tiap tahun, sehingga pada tahun 2019 terdapat 89,7 kematian ibu dari 100.000 kelahiran. Hal ini menunjukkan membaiknya kualitas kesehatan di Kabupaten Mojokerto hingga tahun 2019.

Balita Gizi Buruk

Balita gizi buruk atau malnutrisi atau *severely underweight* adalah kondisi ketika anak tidak menerima nutrisi, mineral, dan kalori yang cukup untuk membantu perkembangan organ vital.



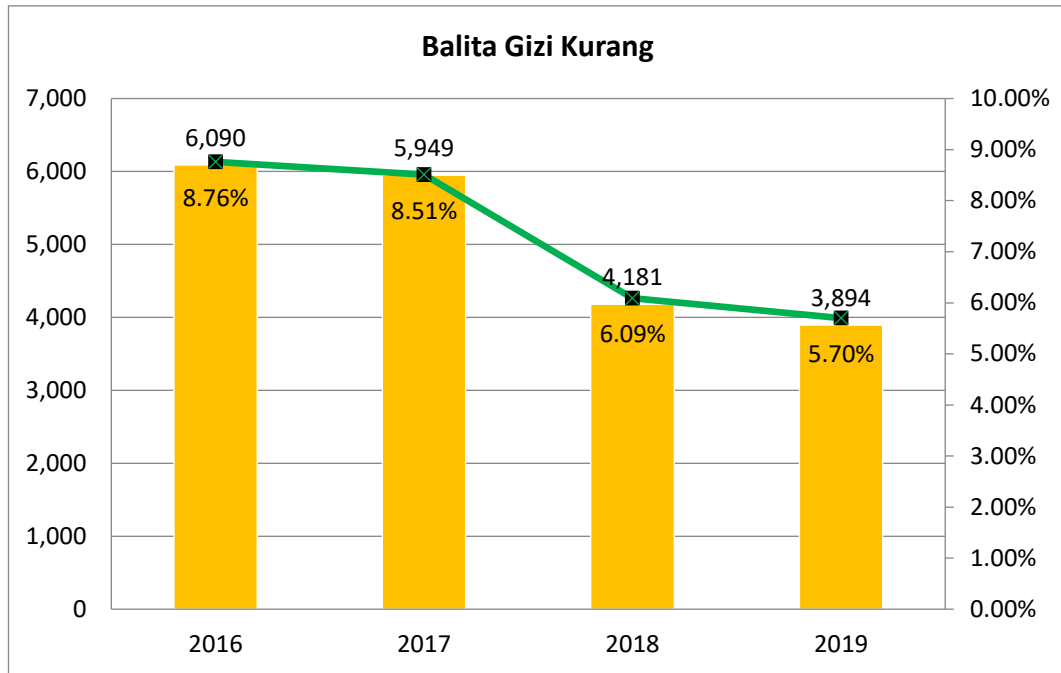
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto

Gambar 2.11 Balita Gizi Buruk Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 - 2019

Persentase balita gizi buruk sebesar 0,34% pada tahun 2016 mengalami penurunan menjadi 0,31% pada tahun 2017, namun naik kembali pada tahun 2018 menjadi 0,33% dan turun kembali pada tahun 2019 menjadi 0,25%. Hal ini menunjukkan bahwa tahun 2019 program penanganan balita gizi buruk sudah membaik.

Balita Gizi Kurang

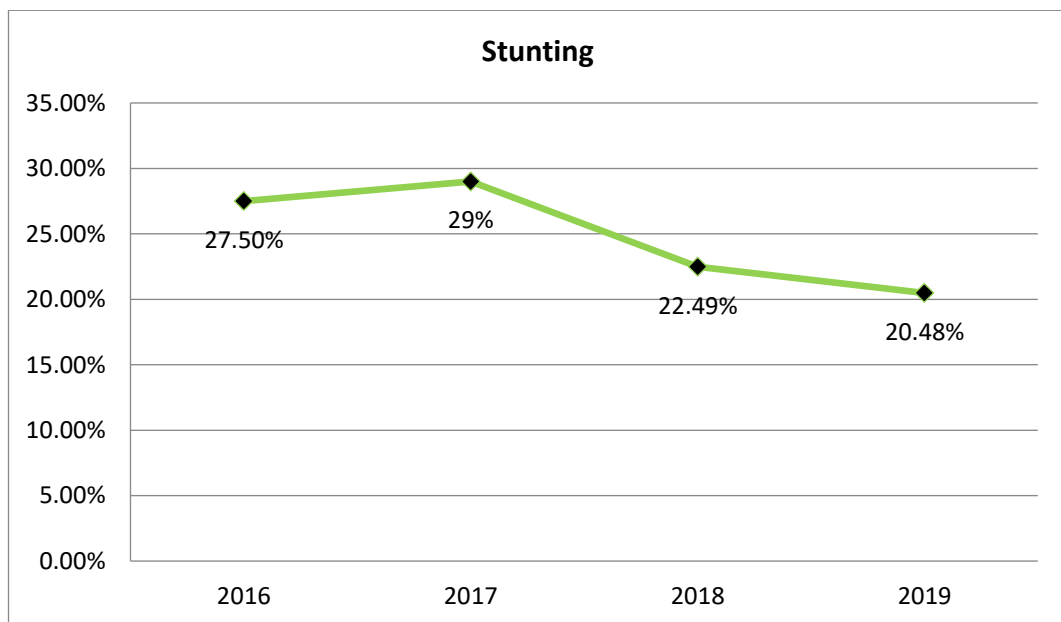
Sedangkan gizi kurang atau *underweight* di Kabupaten Mojokerto pada periode 2016 – 2019 mengalami penurunan setiap tahunnya. Pada tahun 2016, persentase balita gizi kurang sebesar 8,76%, mengalami penurunan hingga pada tahun 2019 menjadi 5,7%. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas kesehatan di Kabupaten Mojokerto semakin membaik.



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto

Gambar 2.12 Balita Gizi Kurang Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 - 2019

Stunting



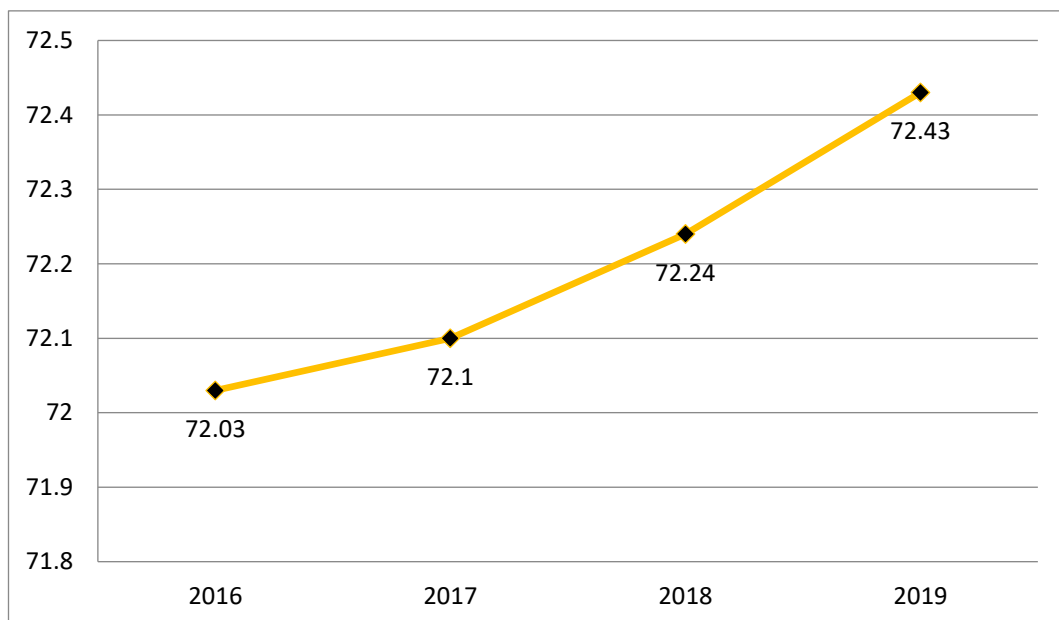
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto

Gambar 2.13 Stunting Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 - 2019



Stunting adalah kondisi gagal pertumbuhan pada anak (pertumbuhan tubuh dan otak) akibat kekurangan gizi dalam waktu yang lama. Pada tahun 2016, persentase stunting sebesar 27,5%. Kemudian pada tahun 2017, persentase stunting mengalami kenaikan menjadi 29%. Dan pada tahun 2018 dan 2019 mengalami penurunan hingga pada tahun 2019 kasus stunting menjadi 20,48%. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas kesehatan semakin membaik.

Angka Harapan Hidup



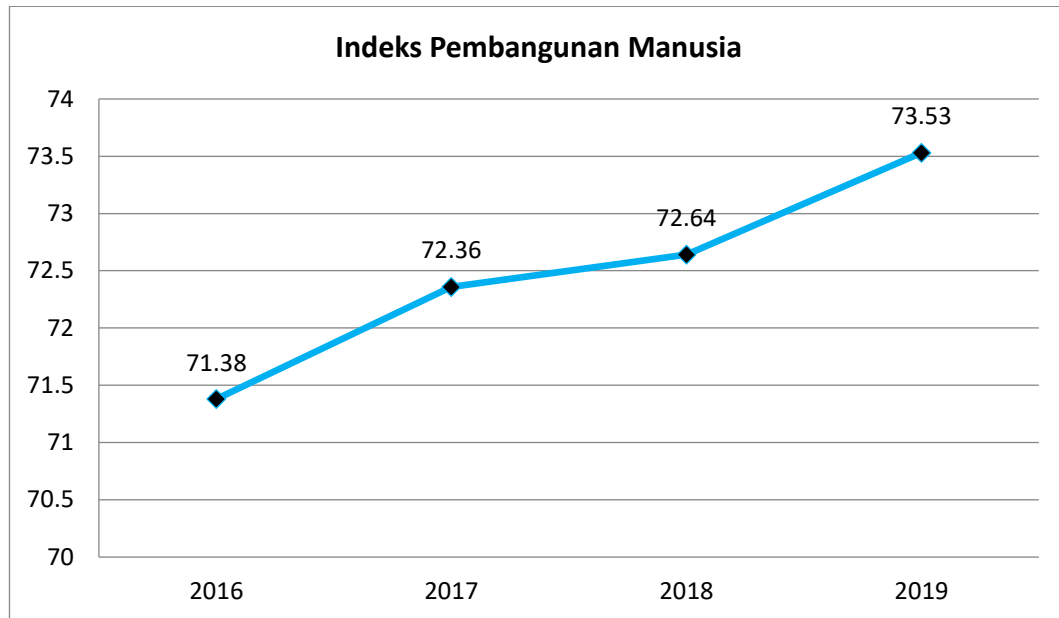
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto

Gambar 2.14 Angka Harapan Hidup Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 - 2019

Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Mojokerto terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2016 hingga 2019, Kabupaten Mojokerto telah berhasil meningkatkan angka harapan hidup dari 72,03 pada tahun 2016 menjadi 72,43 pada tahun 2019 atau naik sebesar 0,4 tahun. Dalam kurun waktu tersebut, secara rata-rata angka harapan hidup tumbuh sebesar 0,13. Ini

menunjukkan bahwa adanya perbaikan pembangunan kualitas kesehatan di Kabupaten Mojokerto.

Indeks Pembangunan Manusia

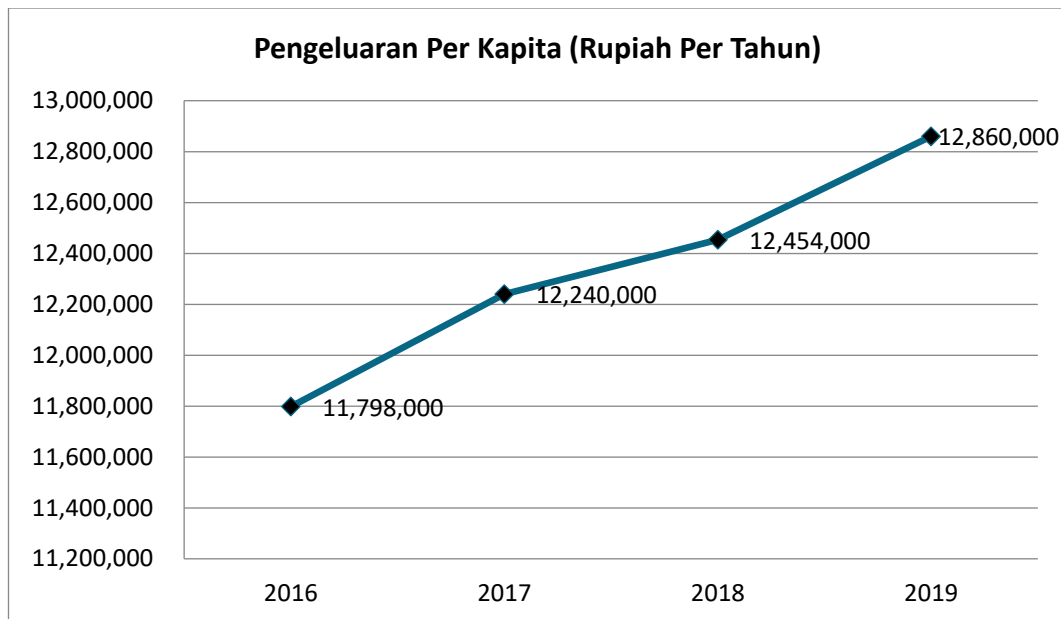


Sumber : BPS Kabupaten Mojokerto

Gambar 2.15 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 - 2019

Berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 – 2019 mengalami kenaikan tiap tahunnya. Pada tahun 2016 nilai IPM sebesar 71,38, mengalami kenaikan hingga pada tahun 2019 mencapai 73,53. Kenaikan nilai IPM ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam meningkatkan pembangunan manusia cukup berhasil. Peringkat IPM Kabupaten Mojokerto bergeser dari tahun sebelumnya, yaitu: menempati peringkat ke-11 se-Jawa Timur. Walaupun demikian, Pemerintah Kabupaten Mojokerto tetap perlu meningkatkan kinerja pembangunan manusianya agar tercapai tujuan yang telah ditetapkan.

Pengeluaran Per Kapita



Sumber : BPS Kabupaten Mojokerto

Gambar 2.16 Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 – 2019

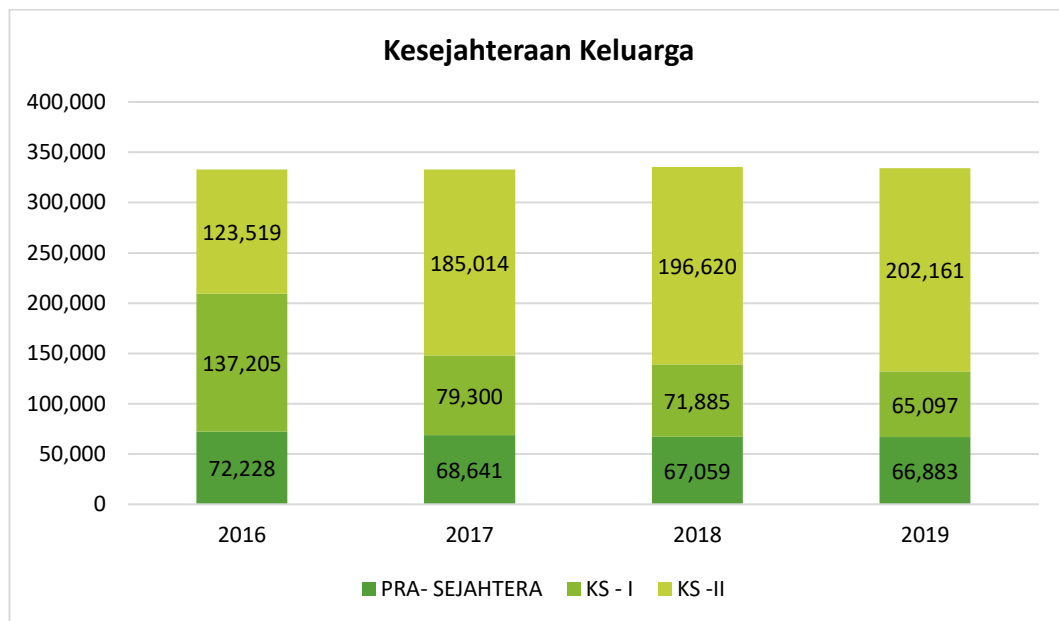
Pengeluaran per kapita digunakan sebagai pendekatan pendapatan masyarakat, dikarenakan data pendapatan sulit diperoleh. Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Mojokerto menunjukkan peningkatan sejak tahun 2016 hingga 2019. Pada tahun 2016 sebesar Rp. 11.798.000,- per tahun mengalami kenaikan tiap tahun hingga pada tahun 2019 pengeluaran per kapita mencapai Rp. 12.860.000,- per tahun.

2.3 Pembangunan Keluarga

Kondisi pembangunan keluarga di Kabupaten Mojokerto pada periode 2016 – 2019 adalah sebagai berikut.

Kesejahteraan Keluarga

Berdasarkan data Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto kesejahteraan keluarga di Kabupaten Mojokerto terdapat pada Keluarga Prasejahtera, Keluarga Sejahtera I dan Keluarga Sejahtera II.



Sumber : Dinas P2KBP2 Kabupaten Mojokerto

Gambar 2.17 Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 – 2019

Berdasarkan Gambar di atas diketahui bahwa masih terdapat Keluarga Prasejahtera dan Keluarga Sejahtera I, namun jumlahnya dari tahun 2016 hingga tahun 2019 jumlahnya terus berkurang. Sedangkan Keluarga Sejahtera II, semakin bertambah tiap tahunnya pada periode tersebut. Hal tersebut menandakan bahwa keluarga di Kabupaten Mojokerto semakin sejahtera.

Berikut merupakan data Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Mojokerto tahun 2019 berdasarkan kecamatan.

**Tabel 2.6** Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Mojokerto Tahun 2019

NO	KECAMATAN	KEPALA KELUARGA	Tahun 2019		
			PRA-SEJAHTERA	KS - I	KS - II
1	JATIREJO	13.406	3.477	2.009	7.920
2	GONDANG	13.380	2.885	3.071	7.424
3	PACET	17.758	3.144	2.987	11.627
4	TRAWAS	9.873	2.248	2.141	5.484
5	NGORO	25.640	5.357	5.346	14.937
6	PUNGGING	23.098	3.754	6.755	12.589
7	KUTOREJO	19.992	4.120	4.557	11.315
8	MOJOSARI	23.913	5.376	5.053	13.484
9	DLANGGU	15.800	1.530	3.377	10.893
10	BANGSAL	14.750	955	1.218	12.577
11	PURI	17.174	2.078	2.608	12.488
12	TROWULAN	21.282	3.170	4.832	13.280
13	SOOKO	21.720	4.265	4.293	13.162
14	GEDEG	20.695	1.599	2.273	16.823
15	KEMLAGI	16.858	3.946	4.374	8.538
16	JETIS	17.630	5.952	3.170	8.508
17	DAWARBLANDONG	24.738	6.165	4.335	14.238
18	MOJOANYAR	16.434	6.862	2.698	6.874
	JUMLAH	334.141	66.883	65.097	202.161

Sumber : Dinas P2KBP2 Kabupaten Mojokerto

Program UPPKS

Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) adalah kelompok usaha ekonomi produktif, yang beranggotakan sekumpulan anggota keluarga yang saling berinteraksi dan terdiri dari berbagai tahapan Keluarga Sejahtera, baik Pasangan Usia Subur ber-KB maupun yang belum ber-KB dalam rangka meningkatkan tahapan kesejahteraan dan memantapkan.

**Tabel 2.7** UPPKS Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 – 2019

NO	KECAMATAN	2016	2017	2018	2019
1	JATIREJO	4	1	1	4
2	GONDANG	5	5	2	2
3	PACET	-	2	2	2
4	TRAWAS	13	13	13	13
5	NGORO	18	18	3	3
6	PUNGGING	9	9	9	7
7	KUTOREJO	7	7	7	7
8	MOJOSARI	11	11	11	11
9	DLANGGU	2	6	6	3
10	BANGSAL	-	2	2	2
11	PURI	6	16	16	16
12	TROWULAN	2	2	2	2
13	SOOKO	5	5	5	5
14	GEDEG	4	4	4	4
15	KEMLAGI	20	20	20	20
16	JETIS	16	16	16	16
17	DAWARBLANDONG	24	24	24	24
18	MOJOANYAR	7	6	6	6
JUMLAH		153	167	149	147

Sumber : Dinas P2KBP2 Kabupaten Mojokerto

Berdasarkan data di atas diketahui bahwa program UPPKS di Kabupaten Mojokerto telah dilaksanakan hingga tahun 2019 terdapat 147 kelompok usaha, namun jumlah tersebut tidak sebanyak tahun-tahun sebelumnya. Perlunya pengoptimalan program UPPKS sehingga dapat mencapai tujuan program sekaligus meningkatkan tahapan kesejahteraan dan memantapkan keluarga.

Mata Pencaharian

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto, mata pencaharian masyarakat Kabupaten Mojokerto yang paling banyak adalah karyawan swasta, wiraswasta, dan petani/pekebun. Pada tahun



2019, persentase karyawan swasta sebanyak 17,87%; wiraswasta sebanyak 13,86%; petani/pekebun 7,55%. Mata pencaharian sebagai karyawan swasta didominasi karena di Kabupaten Mojokerto sendiri banyak perusahaan sektor perdagangan, industri, maupun jasa yang beroperasi.

Tabel 2.8 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan di Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2019

No	Jenis Pekerjaan	2016	2017	2018	2019
1	Belum/Tidak Bekerja	255.983	269.371	274.604	287.185
2	Mengurus Rumah Tangga	196.632	201.025	202.059	205.327
3	Pelajar/Mahasiswa	155.241	152.042	142.549	144.098
4	Pensiunan	5.841	5.836	5.758	5.746
5	Pegawai Negeri Sipil (Pns)	12.430	12.386	12.127	12.091
6	Tentara Nasional Indonesia (Tni)	3.045	3.069	3.045	3.100
7	Kepolisian Ri (Polri)	1.221	1.265	1.280	1.303
8	Perdagangan	2.816	2.796	2.726	2.712
9	Petani/Pekebun	87.355	87.387	85.944	85.598
10	Peternak	532	517	466	459
11	Nelayan/Perikanan	102	94	85	85
12	Industri	166	171	166	157
13	Konstruksi	317	300	276	275
14	Transportasi	183	179	179	178
15	Karyawan Swasta	190.819	195.506	197.369	202.676
16	Karyawan Bumh	967	1.004	1.032	1.072
17	Karyawan Bumd	173	175	174	181
18	Karyawan Honoror	1.078	1.066	1.078	1.083
19	Buruh Harian Lepas	8.467	8.414	8.180	8.072
20	Buruh Tani/Perkebunan	12.529	12.511	12.315	12.336
21	Buruh Nelayan/Perikanan	33	33	30	31
22	Buruh Peternakan	66	65	62	63
23	Pembantu Rumah Tangga	647	631	603	592
24	Tukang Cukur	67	66	63	62
25	Tukang Listrik	84	84	80	80
26	Tukang Batu	1.636	1.643	1.630	1.626
27	Tukang Kayu	572	572	562	558
28	Tukang Sol Sepatu	602	590	573	560
29	Tukang Las/Pandai Besi	170	168	170	171
30	Tukang Jahit	887	878	888	895
31	Tukang Gigi	17	17	16	16
32	Penata Rias	82	78	78	77
33	Penata Busana	7	7	7	7
34	Penata Rambut	43	41	42	39
35	Mekanik	432	442	432	427
36	Seniman	145	143	145	146



No	Jenis Pekerjaan	2016	2017	2018	2019
37	Tabib	29	28	25	25
38	Paraji	8	8	7	7
39	Perancang Busana	2	2	2	2
40	Penterjemah	3	3	3	3
41	Imam Masjid	11	11	10	10
42	Pendeta	64	64	65	66
43	Pastor	1	1	1	1
44	Wartawan	54	53	51	50
45	Ustadz/Mubaligh	240	234	226	223
46	Juru Masak	31	30	29	29
47	Promotor Acara	1	1	1	1
48	Anggota Dpr Ri	2	2	1	1
49	Anggota Dpd Ri	3	3	3	3
50	Anggota Bpk	4	4	4	4
51	Presiden	0	0	0	0
52	Wakil Presiden	0	0	0	0
53	Anggota Mahkamah Konstitusi	0	0	0	0
54	Anggota Kabinet Kementrian	1	1	1	1
55	Duta Besar	0	0	0	0
56	Gubernur	0	0	0	0
57	Wakil Gubernur	0	0	0	0
58	Bupati	1	1	1	1
59	Wakil Bupati	1	0	1	1
60	Walikota	0	0	0	1
61	Wakil Walikota	0	0	0	0
62	Anggota Dprd Prop.	0	0	0	0
63	Anggota Dprd Kab./Kota	23	22	24	24
64	Dosen	379	409	430	459
65	Guru	7.974	8.215	8.567	8.890
66	Pilot	2	2	1	2
67	Pengacara	20	21	18	20
68	Notaris	8	7	9	9
69	Arsitek	17	17	21	20
70	Akuntan	4	6	6	9
71	Konsultan	33	32	29	29
72	Dokter	195	210	219	226
73	Bidan	533	583	629	664
74	Perawat	819	879	937	1.015
75	Apoteker	38	41	39	41
76	Psikiater/Psikolog	0	0	1	2
77	Penyiar Televisi	2	2	1	1
78	Penyiar Radio	12	11	13	9
79	Pelaut	97	95	96	97
80	Peneliti	6	6	6	7
81	Sopir	3.848	3.880	3.846	3.894



No	Jenis Pekerjaan	2016	2017	2018	2019
82	Pialang	8	8	8	8
83	Paranormal	23	18	17	16
84	Pedagang	4.797	4.830	4.847	4.892
85	Perangkat Desa	2.162	2.175	2.194	2.214
86	Kepala Desa	248	251	239	233
87	Biarawan/Biarawati	18	16	15	14
88	Wiraswasta	154.189	155.402	154.256	157.197
89	Pekerjaan Lainnya	107	105	91	87
Total		1.117.405	1.117.405	1.138.261	1.133.783

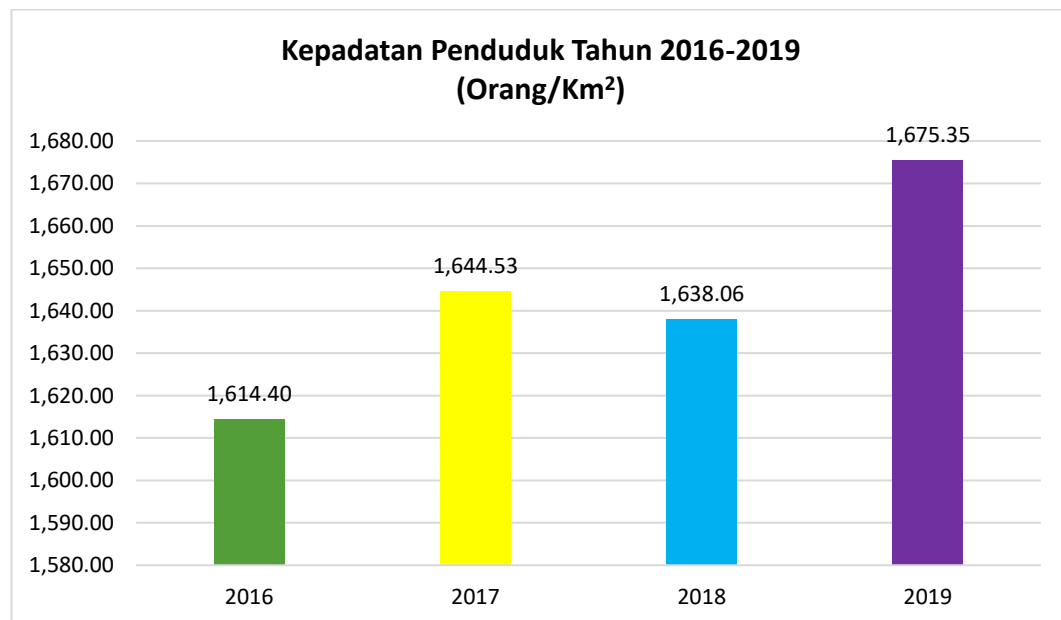
Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto

2.4 Persebaran dan Mobilitas Penduduk

Persebaran dan mobilitas penduduk di Kabupaten Mojokerto akan dibahas sebagai berikut.

Persebaran Penduduk

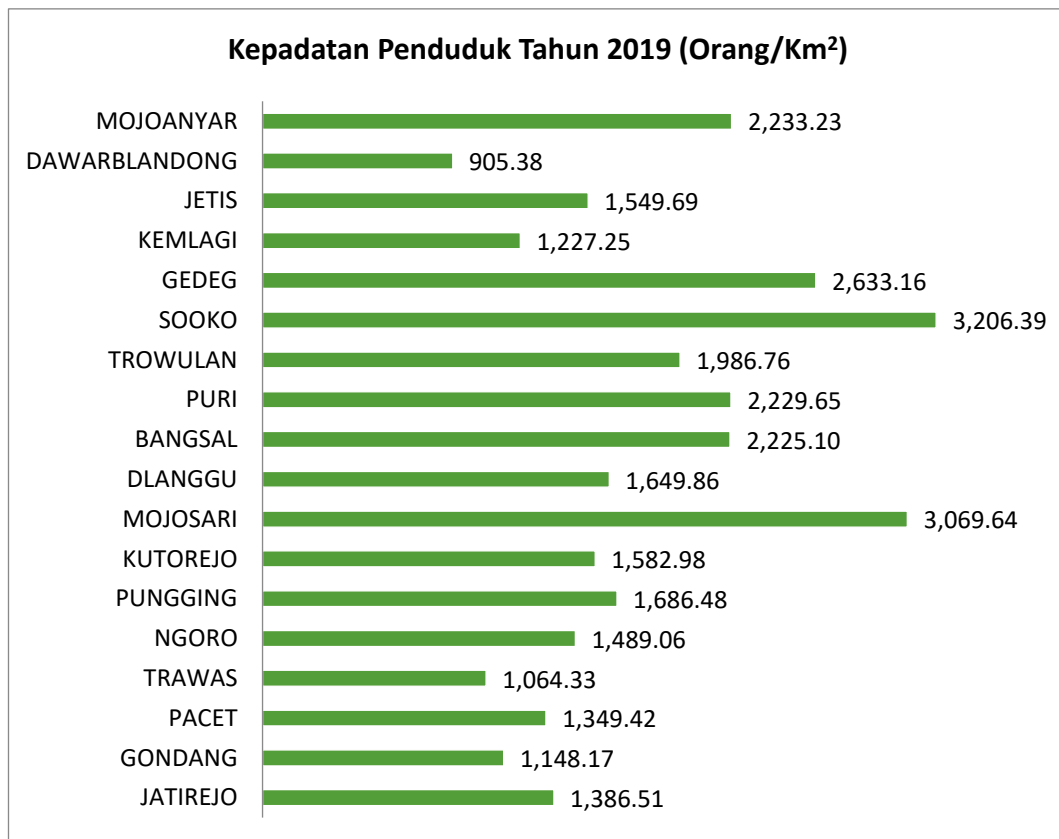
Persoalan persebaran penduduk yang tidak merata merupakan masalah kependudukan klasik yang terjadi di Indonesia.



Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto

Gambar 2.18 Kepadatan Penduduk Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2019

Jika dilihat berdasarkan kepadatan penduduknya, Kabupaten Mojokerto menempati peringkat kedua sebagai kabupaten terpadat di Jawa Timur, setelah Kabupaten Sidoarjo. Dengan kepadatan penduduk Kabupaten Mojokerto pada tahun 2019 sebesar 1.675,35 semakin padat dari tahun-tahun sebelumnya. Artinya di setiap 1 kilometer luas wilayah Kabupaten Mojokerto dihuni oleh 1.675,35 orang penduduk. Sedangkan kepadatan penduduk tiap kecamatan di Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut.



Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto

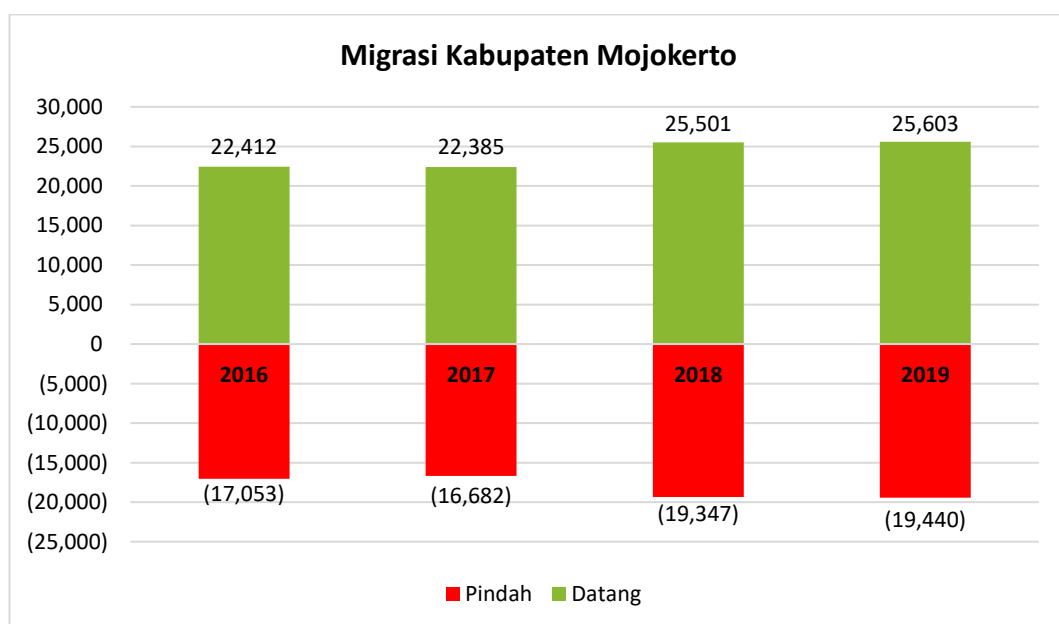
Gambar 2.19 Kepadatan Penduduk Berdasarkan Kecamatan Kabupaten Mojokerto 2019

Kepadatan penduduk di Kabupaten Mojokerto berdasarkan Kecamatan terlihat bahwa kecamatan terpadat adalah kecamatan yang letaknya berdekatan dengan pusat pemerintahan Kabupaten Mojokerto seperti Sooko (3.206,39), Mojosari (3.069,64), Gedeg (2.633,16), Mojoanyar (2.233,23), Puri (2.229,65),

dan Bangsal (2.225,10), sedangkan kecamatan lainnya memiliki kepadatan penduduk dibawah 2.000 orang/km². Kecamatan yang paling tidak padat adalah Kecamatan Dawarblandong dengan kepadatan 905,38 orang/km², hal ini dikarenakan di Kecamatan Dawarblandong memiliki penduduk yang sedikit dan luas lahan banyak dimanfaatkan sebagai lahan perkebunan.

Migrasi

Ketidakseimbangan pembangunan antara desa dan kota, sebagai akibat dari *urban bias policy* yang telah menyebabkan terjadinya migrasi dari desa ke kota yang mengakibatkan tingkat urbanisasi meningkat cepat. Hal ini tidak hanya menyebabkan semakin banyak penduduk yang tinggal di perkotaan/dekat dengan pusat pemerintahan.



Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto

Gambar 2.20 Migrasi Penduduk Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2019

Berdasarkan data migrasi penduduk Kabupaten Mojokerto pada periode Tahun 2016 – 2019 diketahui bahwa migrasi semakin meningkat tiap tahunnya namun jumlah penduduk yang datang ke Kabupaten Mojokerto lebih banyak dari penduduk yang



pindah dari Kabupaten Mojokerto. Migrasi penduduk pindah dan datang lebih sering terjadi di wilayah perkotaan atau dekat dengan pusat pemerintahan Kabupaten Mojokerto, seperti dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2.9 Migrasi Berdasarkan Kecamatan Penduduk Kabupaten Mojokerto Tahun 2019

No	Kecamatan	Pindah			Datang		
		L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
1	JATIREJO	373	386	759	547	525	1.072
2	GONDANG	380	360	740	477	502	979
3	PACET	409	378	787	534	517	1.051
4	TRAWAS	187	162	349	251	273	524
5	NGORO	548	489	1.037	825	746	1.571
6	PUNGGING	577	604	1.181	828	861	1.689
7	KUTOREJO	551	530	1.081	767	805	1.572
8	MOJOSARI	855	790	1.645	1.028	1.093	2.121
9	DLANGGU	458	475	933	658	624	1.282
10	BANGSAL	493	439	932	692	657	1.349
11	PURI	763	729	1.492	1.088	1.023	2.111
12	TROWULAN	688	732	1.420	854	851	1.705
13	SOOKO	798	783	1.581	1.038	1.055	2.093
14	GEDEG	665	637	1.302	673	614	1.287
15	KEMLAGI	545	487	1.032	627	566	1.193
16	JETIS	809	722	1.531	1.035	955	1.990
17	DAWARBLANDONG	370	269	639	391	338	729
18	MOJOANYAR	517	482	999	643	642	1.285
TOTAL		9.986	9.986	9.454	19.440	12.956	12.647

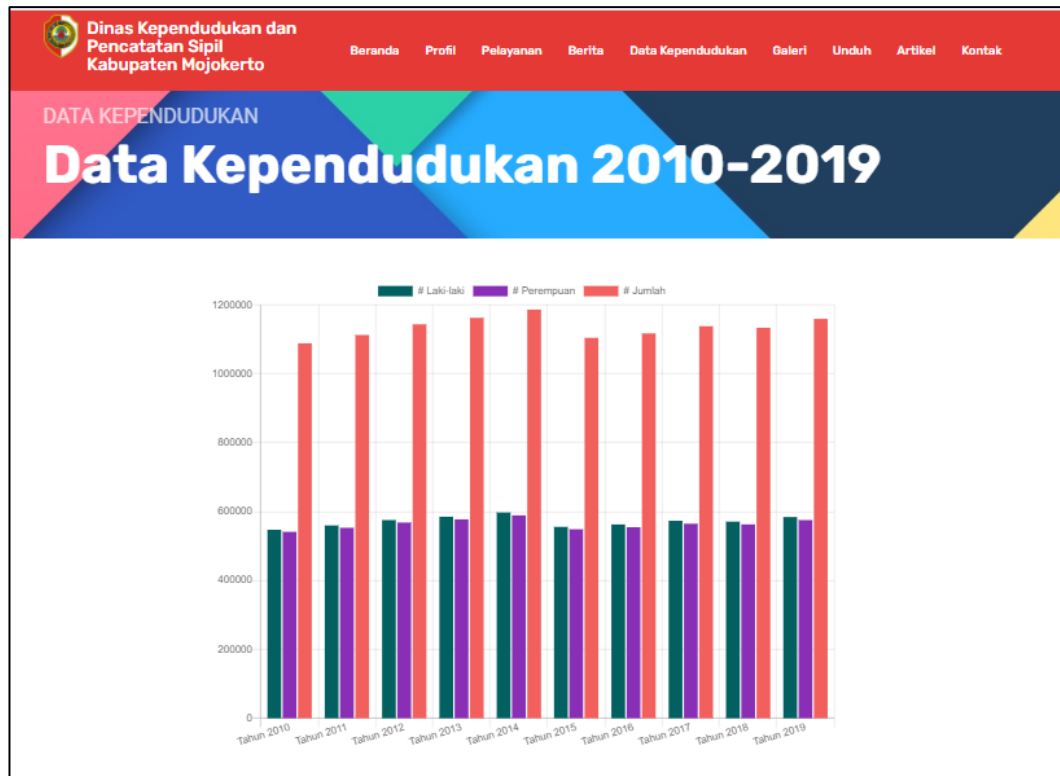
Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto

2.5 Data dan Informasi Kependudukan

Sistem Data dan Informasi Kependudukan Terintegrasi

Data dan informasi kependudukan di Kabupaten Mojokerto telah tersedia dan dapat diakses pada Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) sebagaimana tertuang pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006. Keberadaan sistem ini sangat diperlukan dalam rangka mendukung perencanaan, pelaksanaan dan monitoring serta evaluasi pembangunan. Bukan saja di bidang kependudukan tetapi juga pembangunan pada umumnya. Selain itu, data

kependudukan juga terdapat diakses oleh publik melalui website Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto.



Sumber : dispendukcapil.mojokertokab.go.id

Gambar 2.21 Website Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto



BAB 3

KONDISI YANG DIINGINKAN



BAB 3

KONDISI YANG DIINGINKAN

3.1 Kuantitas Penduduk

Kondisi Kependudukan yang diinginkan Kabupaten Mojokerto adalah tercapainya penduduk yang stabil (penduduk tumbuh seimbang) dalam jumlah yang tidak terlalu besar. Dari kondisi tersebut diharapkan bahwa jumlah bayi yang lahir diharapkan sama (seimbang) dengan jumlah kematian sehingga penduduk tetap pada kondisi stasioner. Negara-negara maju pada umumnya telah mencapai TFR lebih kecil dari 2,1 (*below replacement fertility*, yaitu suatu besaran angka TFR yang diperlukan untuk penggantian suatu generasi). Sesuai dengan target pada *Grand Desain* Pembangunan Kependudukan Indonesia diharapkan angka kelahiran total atau *Total Fertility Rate* (TFR) akan berada pada 1,98 per perempuan atau *Net Reproduction Rate* (NRR) sebesar 0,945 per perempuan pada 2021. Selanjutnya secara berlanjut angka kelahiran total menjadi 1,97 pada tahun 2022; 1,96 pada tahun 2023; 1,95 pada tahun 2024 dan 1,94 pada tahun 2025.

Kondisi ini penting untuk Kabupaten Mojokerto mencapai bonus demografi yang diprediksikan pada tahun 2030 – 2040 yang puncaknya akan dicapai pada 2034 (Bappenas, 2017). Salah satu tanda adanya bonus demografi adalah dengan jumlah penduduk usia produktif yang mencapai puncak, yaitu kira-kira 69,59 persen dari jumlah penduduk. Kondisi ini merupakan kondisi yang diharapkan agar sejak sekarang dapat disusun kebijakan untuk optimalisasi



kesempatan tersebut. Pencapaian tahap ini sangat tergantung kepada pengelolaan pertumbuhan penduduk melalui pengendalian angka kelahiran.

3.2 Kualitas Penduduk

Angka kematian di Kabupaten Mojokerto diharapkan terus menurun, sedangkan angka harapan hidup secara konsisten terus meningkat. Angka kematian bayi pada tahun 2021 diharapkan akan menjadi 5,9 per 1.000 kelahiran hidup dan terus menurun secara berlanjut pada tahun 2025 menjadi sekitar 5,57 per 1.000 kelahiran hidup. Sejalan dengan menurunnya angka kematian bayi, angka harapan hidup Kabupaten Mojokerto juga meningkat dari 72,53 tahun pada tahun 2021 menjadi 73,006 tahun pada tahun 2025.

3.3 Kondisi Keluarga

Kondisi yang diinginkan melalui pembangunan keluarga adalah terwujudnya keluarga di Kabupaten Mojokerto yang berkualitas, sejahtera, dan berketahanan sosial, meliputi :

1. Keluarga berdasarkan perkawinan yang sah dan bertakwa kepada Tuhan YME.
2. Keluarga sejahtera, sehat, maju, mandiri dengan jumlah anak yang ideal dan harmonis yang berkeadilan dan berkesetaraan gender.
3. Keluarga yang berketahanan sosial memiliki perencanaan sumberdaya keluarga, berwawasan Nasional, berkontribusi bagi masyarakat dan bangsa; Keluarga yang berkontribusi kepada masyarakat, yaitu keluarga



yang mampu berperan serta dalam kegiatan sosial kemasyarakatan dan memiliki kepedulian terhadap lingkungannya; Keluarga yang berkontribusi kepada bangsa dan negara serta berpartisipasi dalam kegiatan bela negara, taat membayar pajak, patuh terhadap peraturan perundangan yang berlaku.

3.4 Persebaran dan Mobilitas Penduduk

Dari aspek mobilitas penduduk, kondisi yang diinginkan adalah terciptanya persebaran penduduk yang lebih merata antar wilayah di Kabupaten Mojokerto, sehingga konsentrasi penduduk tidak semakin besar di beberapa kecamatan yang padat penduduknya. Selain itu juga berkaitan dengan urbanisasi, harapannya penduduk di wilayah pedesaan tidak berbondong-bondong datang ke wilayah perkotaan yang dapat menimbulkan masalah baru. Namun perlu disadari bahwa urbanisasi tidak hanya terjadi karena perpindahan penduduk dari desa ke kota, tetapi juga karena wilayah-wilayah dengan kategori urban/perkotaan semakin banyak jumlahnya karena fasilitas dan hasil pembangunan yang mulai merata.

Kondisi persebaran penduduk yang diinginkan adalah persebaran penduduk yang merata dan pengaturan mobilitas sesuai dengan potensi daerah. Tentunya yang diharapkan adalah adanya penataan dan persebaran yang proporsial sesuai daya dukung alam dan lingkungan. Ini berarti pemerintah harus dapat menata keberadaan penduduk melalui perpindahan penduduk dari beberapa kecamatan di Kabupaten Mojokerto. Dari segi mobilitas penduduk,



kondisi yang diinginkan adalah mendorong urbanisasi dari kecamatan padat penduduk di Kabupaten Mojokerto melalui perubahan konsentrasi pusat pelayanan publik. Perubahan tersebut dilakukan dengan mendorong perpindahan penduduk perkotaan ke pedesaan. Selain itu distribusi pusat pelayanan publik diubah dan wilayah pedesaan menjadi pusat perekonomian.

3.5 Data dan Informasi Kependudukan

Kondisi yang diinginkan dari pembangunan data dan informasi kependudukan secara umum dapat diuraikan sebagai berikut.

- a. Tersusunnya sistem survei dan pengumpulan data dan informasi data kependudukan yang sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah terkait dan pihak swasta yang membutuhkan.
- b. Tersusunnya sistem *database* kependudukan sehingga diperoleh data dan informasi kependudukan yang andal, akurat, riil, dan dapat digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan secara cepat.

Kabupaten Mojokerto telah memiliki Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan data kependudukan juga terdapat diakses oleh publik melalui website Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto, tentunya sistem ini masih belum sempurna perlu adanya pembenahan agar dapat memenuhi kebutuhan instansi pemerintah terkait dan pihak swasta yang membutuhkan dan dapat digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan secara cepat. Untuk tercapainya hal tersebut diperlukan tenaga khusus yang menangani sistem data tersebut, agar kedepannya juga



sistem dapat dikembangkan menjadi lebih baik dan mengikuti perkembangan jaman.

3.6 Permasalahan dan Tantangan

Berbagai permasalahan dan tantangan terkait dengan kondisi yang diinginkan dalam pembangunan kependudukan Kabupaten Mojokerto akan dibahas sebagai berikut.

Disparitas Pembangunan Antar Wilayah

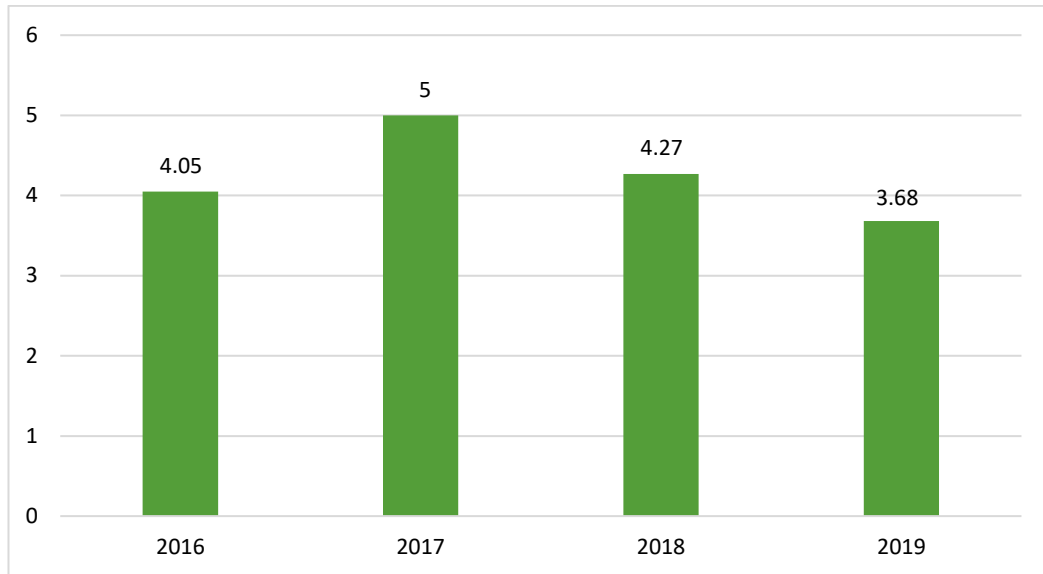
Disparitas pembangunan antar wilayah seringkali menjadi permasalahan serius dan apabila tidak dieleminir secara bertahap dapat menimbulkan permasalahan yang lebih kompleks (seperti masalah kependudukan, sosial, ekonomi, politik dan lingkungan). Oleh sebab itu diperlukan pemahaman mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya disparitas pembangunan antar wilayah. Faktor-faktor tersebut antara lain meliputi faktor biofisik/karakteristik wilayah (sumberdaya alam), sumberdaya buatan (ketersediaan sarana dan prasarana sosial-ekonomi), sumberdaya manusia, sumberdaya sosial, karakteristik struktur ekonomi wilayah, dan kebijakan pemerintah daerah. Dengan mengetahui faktor-faktor penyebab disparitas tersebut diharapkan dapat dikembangkan kebijakan dan strategi dalam rangka mengurangi tingkat disparitas yang terjadi.

Tingginya angka pengangguran

Hal ini dapat disebabkan dari berkurangnya lapangan pekerjaan yang tersedia di wilayah Kabupaten Mojokerto dan minat lembaga/instansi/perusahaan mencari SDM yang berkualitas, berintelektual tinggi dan berdaya saing karena



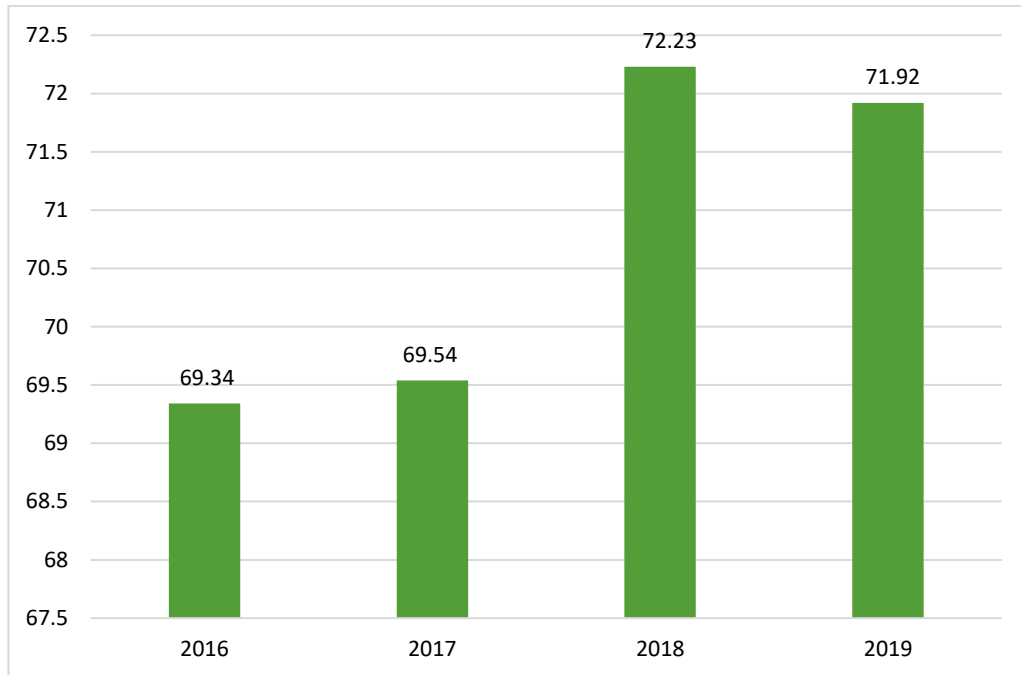
masyarakat Kabupaten Mojokerto cenderung belum memiliki SDM yang memenuhi kebutuhan lembaga/instansi/perusahaan. Untuk itu perlu adanya peningkatan kesempatan kerja untuk penyerapan tenaga kerja, meningkatkan kualitas dan produktifitas ketenagakerjaan dan kompetensi tenaga kerja. Minimnya akses masyarakat miskin terhadap kesempatan kerja, masih banyaknya penduduk usia angkatan kerja yang kurang mempunyai ketrampilan atau kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan di dunia industri dan wirausaha. Sehingga Angka tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Mojokerto pada tahun 2016 adalah 4,05 kemudian meningkat di tahun 2017 menjadi 5. Pada tahun 2018 angka tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Mojokerto mengalami penurunan menjadi 4,27 dan mengalami penurunan lagi pada tahun 2019 menjadi 3,68. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Mojokerto telah berhasil mengurangi pengangguran di wilayahnya, karena angka tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Mojokerto ada yang menurun. Namun ada tren kenaikan tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2016 dan 2017 sehingga perlu diwaspadai akan adanya penurunan kembali, apalagi di masa pandemi Covid-19.



Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto

Gambar 3.1 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2019

Sedangkan dilihat dari tingkat partisipasi angkatan kerja Kabupaten Mojokerto pada periode tahun 2016 hingga tahun 2019 mengalami tren yang fluktuatif. Pada tahun 2016, tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 69,34 kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2017 menjadi 69,54. Pada tahun 2018 mengalami kenaikan yang cukup drastis menjadi 72,23. Namun pada tahun 2019 angkanya menurun menjadi 71,92. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja yang berada pada usia kerja telah cukup tinggi, namun yang perlu dikhawatirkan adalah penurunan angka partisipasi kerja karena telah terjadi penurunan pada tahun 2019.



Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto

Gambar 3.2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2019



BAB 4

POKOK-POKOK PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN



BAB 4

POKOK – POKOK PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN

Pokok-Pokok Pembangunan Kependudukan berisi terkait pokok-pokok atau hal penting yang akan dicapai dalam pembangunan kependudukan meliputi pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, strategi pembangunan keluarga, pengarahan mobilitas penduduk, dan pembangunan sistem data informasi kependudukan.

4.1 Pengendalian Kuantitas Penduduk

Berdasarkan kuantitas penduduk, pengelolaan kuantitas penduduk pada dasarnya diarahkan untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk melalui pengaturan kelahiran. Kebijakan pengaturan kelahiran/fertilitas dilakukan melalui pemenuhan hak reproduksi untuk mencapai kesehatan reproduksi yang prima melalui program KB. Secara prinsip program KB dilaksanakan untuk membantu pasangan suami istri mengambil keputusan dan memenuhi hak-hak reproduksi yang berkaitan dengan hal berikut.

1. Pengaturan kehamilan yang diinginkan
2. Penurunan angka kematian bayi dan angka kematian ibu
3. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan
4. Peningkatan kesertaan KB pria
5. Promosi pemanfaatan air susu ibu.

Strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan kuantitas penduduk adalah dengan:



1. Meningkatkan jejaring pengendalian penduduk. Arah kebijakannya adalah Promosi dan penggerakan masyarakat guna meningkatkan komitmen stakeholder (pemangku kebijakan dan meningkatkan peran serta mitra kerja) dan Peningkatan kemitraan dengan lintas sektor (OPD terkait, instansi vertikal, swasta, LSM, LSOM dan Perguruan Tinggi).
2. Meningkatkan cakupan KB aktif. Arah kebijakan yang diambil adalah:
 - a. Penyediaan alat kontrasepsi di setiap fasilitas kesehatan
 - b. Peningkatan partisipasi peserta KB pria
 - c. Peningkatan kesertaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP).
 - d. Peningkatan akses informasi, kualitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi bagi keluarga.
3. Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Arah kebijakannya adalah peningkatan Tribina (BKB, BKR dan BKL), pembinaan remaja dalam menyiapkan kehidupan berkeluarga, serta peningkatan pendapatan keluarga.

Penurunan Mortalitas

Penurunan angka kematian bertujuan untuk mewujudkan pendudukan penduduk tumbuh seimbang dan berkualitas pada seluruh dimensinya.

Penurunan angka kematian ini diprioritaskan pada upaya :

1. Penurunan angka kematian ibu hamil
2. Penurunan angka kematian ibu melahirkan
3. Penurunan angka angka kematian pasca melahirkan
4. Penurunan angka kematian bayi dan anak



4.2 Peningkatan Kualitas Penduduk

Pokok-Pokok Pembangunan untuk peningkatan kualitas penduduk dilihat dari dimensi kesehatan dan pendidikan.

Dimensi Kesehatan:

- Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam rangka menurunkan angka kematian dan meningkatkan angka harapan hidup.

Dimensi Pendidikan:

- Meningkatkan kualitas penduduk melalui pendidikan formal, nonformal maupun informal dalam rangka memenuhi kebutuhan pembangunan nasional.
- Meningkatkan status ekonomi penduduk yang berkeadilan melalui perluasan akses ke pasar kerja sebagai bagian integral dari program penanggulangan kemiskinan.
- Meningkatkan derajat kesehatan, pendidikan, dan status ekonomi penduduk.

Strategi peningkatan kualitas penduduk

Strategi di bidang **kesehatan** dilakukan untuk menurunkan angka kematian bayi dan anak serta kematian maternal. Maka dari itu, **strategi pertama** yang harus dilakukan adalah mengurangi angka kematian bayi dan meningkatkan angka harapan hidup (AHH) di bidang kesehatan yaitu:

1. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat bagi warga miskin, dengan strategi meningkatkan akses pelayanan



kesehatan bagi penduduk miskin. Arah kebijakan pembayaran iuran jaminan pelayanan kesehatan penduduk miskin dan kelompok tertentu

2. Meningkatnya kualitas layanan kesehatan ibu dan anak, dengan strategi:
 - a. Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi ibu, dan anak. Arah kebijakan pelaksanaan deteksi dini kelainan kehamilan dan pemberian imunisasi bayi dan balita.
 - b. Meningkatkan cakupan pelayanan gizi ibu dan anak, dengan arah kebijakan
 - (i) Pemberian makanan tambahan bagi balita kurang gizi dan makanan pendamping ASI
 - (ii) Pendampingan dan pemantauan status gizi ibu hamil/menyusui, bayi dan balita
 - (iii) Pemberian makanan tambahan dan suplemen bagi ibu hamil
 - (iv) Pendampingan ibu dan anak pada 1000 hari pertama kelahiran
 - (v) Pengembangan kampung ASI
3. Meningkatkan kualitas sarana, prasarana, serta tata kelola layanan kesehatan dengan strategi pertama mencukupi kebutuhan sarana dan prasarana RSUD dan Puskesmas sesuai standar sarana dan prasarana, Arah kebijakan yang dipilih, yaitu:
 - a. Perencanaan dan pengadaan sarana dan prasarana berdasarkan standar dan perkembangan ilmu kesehatan



- b. Peningkatan sarana prasarana kesehatan melalui sistem informasi kesehatan
- c. Pemenuhan operasional pelayanan kesehatan
- d. Pemeliharaan sarana dan prasarana dilakukan secara berkala dan bersifat preventif
- e. Perencanaan dan pengadaan sarana dan prasarana sesuai tipe rumah sakit dan perkembangan ilmu kesehatan

Strategi kedua adalah Meningkatkan kinerja pelayanan RSUD dan Puskesmas/Puskesmas Pembantu (Pustu) sesuai standar untuk keselamatan pasien. Arah kebijakan yang dipilih adalah:

- a. Pelaksanaan akreditasi puskesmas dan rumah sakit dan pemantauan implementasinya secara berkala
- b. Peningkatan mutu SDM kesehatan melalui sertifikasi dan akreditasi
- c. Pengembangan manajemen serta pelayanan kesehatan rujukan, medik, administrasi, dan keperawatan di sarana kesehatan

Strategi ketiga adalah menjamin ketersediaan dan pendistribusian obat dan perbekalan kesehatan di sarana kesehatan sesuai kebutuhan. Arah kebijakan yang dipilih perencanaan dan pengadaan obat dan perbekalan kesehatan berbasis kebutuhan.

Strategi keempat adalah mewujudkan lingkungan sehat di masyarakat. Strateginya adalah Mendorong pola hidup bersih dan sehat di masyarakat melalui upaya promotif dan preventif. Arah kebijakannya adalah :



1. Pemantauan kebersihan dan kesehatan makanan dan minuman di masyarakat
2. Promosi hidup sehat di masyarakat, rumah sakit dan Puskesmas
3. Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular
4. Penyediaan pelayanan kesehatan khusus

Strategi yang harus dilakukan untuk peningkatan kualitas **pendidikan** adalah memberikan akses yang sebesar-besarnya kepada kelompok rentan, khususnya penduduk miskin untuk memperoleh pendidikan. Penurunan gap terhadap gender dalam hal akses pelayanan pendidikan juga penting sebagai prioritas, khususnya untuk mengatasi masalah di daerah yang masih lebar kesenjangan pendidikan antara laki-laki dan perempuan. Kebijakan pendidikan juga harus disusun berdasarkan kebutuhan kualifikasi SDM di setiap koridor.

Sedangkan secara **ekonomi**, persoalan pemerataan hasil pembangunan merupakan masalah mendesak dan penting untuk dipenuhi, saat ini telah mulai dilakukan pemerataan hasil pembangunan, hal tersebut harus menjadi prioritas untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk.

4.3 Strategi Pembangunan Keluarga

Sasaran pembangunan keluarga adalah seluruh keluarga Indonesia yang terdiri dari keluarga dengan siklus keluarganya; keluarga yang memiliki potensi dan sumber kesejahteraan sosial; keluarga rentan secara ekonomi, sosial,



lingkungan, maupun budaya; serta keluarga yang bermasalah secara sosial ekonomi dan sosial psikologis dengan strategi sebagai berikut:

- a. Membangun keluarga yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, melalui pendidikan etika, moral, dan sosial budaya secara formal maupun informal
- b. Membangun iklim berkeluarga berdasarkan perkawinan yang sah dilakukan dengan meningkatkan pelayanan lembaga penasihat perkawinan, meningkatkan peran kelembagaan keluarga, komitmen pemerintah yang hanya mengakui perkawinan antara laki-laki dan perempuan, perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama dan negara, perkawinan yang mensyaratkan diketahui oleh keluarga dan masyarakat.
- c. Membangun keluarga harmonis, sejahtera, sehat, maju, dan mandiri melalui peningkatan ketahanan keluarga berwawasan gender berbasis kelembagaan lokal, pengembangan perilaku hidup sehat pada keluarga (sehat fisik/reproduksi, sehat psikologis, sehat sosial, dan sehat lingkungan), pendidikan dan pengasuhan anak agar berkarakter baik, pengembangan ketahanan keluarga dan ketahanan pangan keluarga.
- d. Membangun keluarga yang berwawasan nasional dan berkontribusi kepada bangsa dan negara melalui kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) keluarga, seperti penguatan kapasitas keluarga, pembangunan sebuah keluarga berketahanan sosial, pemilihan keluarga



pionir, dan peningkatan peran serta keluarga dalam kegiatan sosial kemasyarakatan.

- e. Membangun keluarga yang mampu merencanakan sumber daya dengan pendampingan manajemen sumber daya keluarga.

4.4 Pengarahan Mobilitas Penduduk

Dilakukannya pengarahan mobilitas penduduk bertujuan sebagai berikut:

1. Menumbuhkan kondisi kondusif bagi terjadinya migrasi internal yang harmonis.
2. Melindungi penduduk yang terpaksa pindah karena keadaan.
3. Memberikan kemudahan, perlindungan, dan pembinaan terhadap para pendatang dan keluarga.
4. Menciptakan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
5. Mengendalikan kualitas penduduk di suatu daerah/wilayah tertentu serta mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru.
6. Memperluas kesempatan kerja produktif.
7. Meningkatkan ketahanan dan pertahanan nasional.
8. Menurunkan angka kemiskinan dan mengatasi pengangguran.
9. Meningkatkan kualitas dan produktivitas sumber daya manusia.
10. Meningkatkan infrastruktur pemukiman, meningkatkan daya saing wilayah, meningkatkan kualitas lingkungan, dan meningkatkan penyediaan pangan bagi masyarakat.



Strategi pengarahannya mobilitas penduduk dilakukan melalui:

1. Mengupayakan peningkatan mobilitas non permanen dengan cara menyediakan berbagai fasilitas sosial, ekonomi, budaya, dan administrasi di beberapa daerah yang diproyeksikan sebagai daerah tujuan mobilitas penduduk
2. Untuk mengurangi mobilitas penduduk ke kota, sehingga perlu adanya penataan wilayah penyangga dengan mengembangkan daerah tujuan transmigrasi. Transmigrasi seharusnya tidak terkesan membuang penduduk ke wilayah terpencil, tetapi benar-benar menonjolkan napas distribusi penduduk.

Tiga pendekatan dalam kebijakan pengarahannya mobilitas penduduk:

1. Mengurangi peran pusat dan meningkatkan promosi daerah-daerah tujuan baru sehingga penduduk terangsang untuk melakukan perpindahan secara spontan.
2. Membuat regulasi yang menguntungkan bagi daerah tujuan dengan sasaran menghambat/mengurangi minat penduduk yang tidak berkualitas berpindah ke daerah lain.
3. Membuat kebijakan terintegrasi dengan kebijakan berskala nasional berkaitan dengan transmigrasi ke pulau terdepan, peningkatan kualitas prasarana dan sarana ekonomi, serta meningkatkan akulturasi dan asimilasi kultural antara pendatang dan penduduk asli.



4.5 Pembangunan Sistem Data dan Informasi Kependudukan

Salah satu langkah awal untuk mengambil suatu keputusan adalah adanya dasar pengambilan keputusan yaitu dengan menggunakan data. Dalam kependudukan pengambilan keputusan tentunya harus didasari dengan data-data berkaitan dengan kependudukan. Namun kendala yang saat ini terjadi adalah sulitnya akses data yang tersedia, adapun biasanya harus melewati prosedur yang lama dan sulit. Maka dari itu perlu adanya pembangunan sistem data dan informasi kependudukan yang dapat diakses oleh pihak-pihak yang membutuhkan, baik pemerintahan, swasta maupun masyarakat umum. Kebijakan umum dalam pembangunan sistem data dan informasi adalah dengan pengelolaan pengembangan *database* kependudukan yang memiliki akurasi dan tingkat kepercayaan yang tinggi serta dikelola dalam suatu sistem yang integratif, mudah diakses para pemangku kepentingan, serta menjadi bagian dari *Decision Support System* (DSS). Kondisi ini didukung oleh penguatan kapasitas sumber daya manusia yang memiliki kompetensi tinggi, infrastruktur yang memadai, serta sistem kelembagaan yang kuat.

Strategi pembangunan sistem data dan informasi kependudukan yang dapat ditempuh sesuai dengan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Indonesia dan dapat diterapkan di Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut:

1. Pemantapan layanan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) untuk instansi pemerintah terkait lainnya atau lebih dikenal dengan konsep *Government to Government* (G2G), layanan SAK untuk masyarakat atau dikenal dengan istilah *Government to Citizen* (G2C), layanan SAK untuk



dunia bisnis atau *Government to Business* (G2B), dan Pemantapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dengan berbagai penyempurnaan dan penyesuaian fitur agar sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006

2. Pengembangan *database* kependudukan untuk menjadi acuan bagi perencanaan pemerintah secara nasional dan pemanfaatan dunia bisnis, seperti untuk kebutuhan *marketing research*, *e-payment*, *e-commerce*, dan transaksi bisnis berbasis elektronik lainnya
3. Pemantapan fungsi dan peranan *database* kependudukan yang berlandaskan pada tertib administrasi kependudukan dan layanan prima administrasi kependudukan
4. Pengembangan sistem terhubung dengan data lain yang berasal dari berbagai lembaga sesuai dengan data yang telah ada. Sistem ini dikembangkan agar lebih mudah diakses oleh pemangku kepentingan
5. Pengembangan sistem yang telah terbangun menjadi bagian dari DSS (*Decision Support System*) yang terintegrasi. Tujuannya adalah memfasilitasi pengambil kebijakan untuk menggunakan data informasi yang tersedia untuk pengambilan keputusan atau penanganan suatu permasalahan secara cepat.



BAB 5

ROADMAP PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN

**BAB 5****ROADMAP PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN**

Pembangunan kependudukan dan keluarga yang berkualitas merupakan langkah penting dalam mencapai pembangunan berkelanjutan. Hal ini diselenggarakan melalui pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, pembangunan keluarga, pengarahannya mobilitas penduduk, dan pembangunan sistem data dan informasi kependudukan.

5.1 Pengendalian Kuantitas Penduduk

Roadmap Grand Design Pengendalian Kuantitas Penduduk merupakan rencana dan sasaran pembangunan kependudukan Kabupaten Mojokerto agar tujuan pembangunan kependudukan dapat berjalan sistematis dan terencana sehingga dapat diketahui sasaran-sasaran yang harus dicapai pada setiap periode, serta kebijakan, strategi, dan program yang perlu dilakukan.

Tabel 5.1 *Roadmap Grand Design* Pengendalian Kuantitas Penduduk

	2021	2022	2023	2024	2025
Jumlah Penduduk	1.169.760	1.180.405	1.191.029	1.201.629	1.212.203
Rasio Ketergantungan	43,52	43,50	43,47	43,44	43,40
Angka Kelahiran Total (TFR)	1,98	1,97	1,96	1,95	1,94
Net Reproduction Rate (NRR)	0,945	0,94	0,938	0,934	0,93
Child Woman Ratio (CWR)	0,267	0,27	0,272	0,273	0,274
Crude Birth Rate (CBR)	14,2	14	13,2	13,4	13,5
Angka Kematian Bayi (AKB)	5,9	5,75	5,65	5,6	5,57
	2020- 2021	2021- 2022	2022- 2023	2023- 2024	2024- 2025
Laju Pertumbuhan Penduduk/tahun (%)	0,92	0,91	0,90	0,89	0,88

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Diolah dengan proyeksi)



Sasaran jumlah penduduk Kabupaten Mojokerto periode 2021-2025 dengan laju pertumbuhan penduduk tiap tahun berkisar 1,19% hingga 1,23% sehingga jumlah penduduk Kabupaten Mojokerto 1.169.181 jiwa pada tahun 2021; 1.179.820 jiwa pada tahun 2022; 1.190.557 jiwa pada tahun 2023; 1.201.391 jiwa pada tahun 2024; dan 1.212.323 jiwa pada tahun 2025.

Target rasio ketergantungan pada tahun 2021 adalah 43,52 dimana artinya setiap 100 penduduk produktif menanggung 43,52 penduduk tidak produktif yang terdiri dari lansia dan anak-anak. Kemudian target pada tahun selanjutnya, rasio ketergantungan 43,50 pada tahun 2022; 43,47 pada tahun 2023; 43,44 pada tahun 2024; dan 43,40 pada tahun 2025.

Sedangkan target Angka Kelahiran Total atau *Total Fertility Rate* (TFR) pada tahun 2021 sebesar 1,98, artinya jumlah rata-rata anak yang dilahirkan oleh seorang wanita selama masa usia suburnya (antara umur 15-49 tahun) sebesar 1,98. Dengan target angka kelahiran total sebesar 1,97 pada tahun 2022; 1,96 pada tahun 2023; 1,95 pada tahun 2024; dan 1,94 pada tahun 2025.

Kemudian target *Net Reproduction Rate* (NRR) atau Angka reproduksi bersih pada tahun 2021-2025 berkisar diangka 0,9 yang artinya penduduk perempuan memiliki kemampuan penduduk perempuan melahirkan bayi perempuan sebesar 0,9 atau 1 bayi.

Target *Child Woman Ratio* (CWR) atau rasio ibu anak pada tahun 2021 sebesar 0,267 artinya jumlah anak usia 0-4 tahun sebanyak 267 anak dari 1.000 ibu. Dengan target 0,27 pada tahun 2022; 0,272 pada tahun 2023; 0,273 pada tahun 2024; dan 0,274 pada tahun 2025.



Target *Crude Birth Rate* (CBR) atau angka kelahiran kasar pada tahun 2021 sebesar 14,2 artinya banyaknya kelahiran pada tahun 2021 per 1000 penduduk sebanyak 14,2 kelahiran. Target *Crude Birth Rate* (CBR) pada tahun selanjutnya: 14 pada tahun 2022; 13,2 pada tahun 2023; 13,4 pada tahun 2024; dan 13,5 pada tahun 2025.

Angka Kematian Bayi (AKB) harus diminimalisir jumlahnya, sehingga target angka kematian bayi pada tahun 5,9 artinya terdapat kematian 5,9 bayi dari 1.000 kelahiran. Sedangkan target pada tahun selanjutnya adalah 5,75 pada tahun 2022; 5,65 pada tahun 2023; 5,6 pada tahun 2024; dan 5,57 pada tahun 2025.

5.2 Peningkatan Kualitas Penduduk

Rata-Rata Lama Sekolah

Semakin tingginya Rata-Rata Lama Sekolah menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Mojokerto lebih sadar akan pentingnya pendidikan, hal tersebut dapat dilihat dari lamanya penduduk usia 25 tahun ke atas duduk di bangku sekolah. Target Rata-Rata Lama Sekolah yang hendak dicapai pada tahun 2025 sebesar 9,19 tahun atau pada tingkatan telah lulus sekolah menengah pertama. *Roadmap* untuk meningkatkan kualitas penduduk dengan target Rata-Rata Lama Sekolah sebagai berikut:

**Tabel 5.2 Roadmap Rata-Rata Lama Sekolah**

Tahun	Rata-Rata Lama Sekolah
2021	8,24
2022	8,46
2023	8,70
2024	8,94
2025	9,19

Sumber : Dinas Pendidikan (Diolah dengan proyeksi)

Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. Target APM tingkat SD/MI pada tahun 2025 adalah 96,181 dan target APM tingkat SMP/MTs pada tahun 2025 adalah 88,029. Dengan *Roadmap* peningkatan kualitas penduduk melalui angka partisipasi murni sebagai berikut:

Tabel 5.3 Roadmap Angka Partisipasi Murni

Tahun	SD/MI	SMP/MTs
2021	96,060	82,429
2022	96,090	83,829
2023	96,120	85,229
2024	96,151	86,629
2025	96,181	88,029

Sumber : Dinas Pendidikan (Diolah dengan proyeksi)

Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Target angka harapan hidup penduduk Kabupaten Mojokerto pada tahun 2025 adalah sebesar 73,066 yang artinya harapan hidup penduduk Kabupaten Mojokerto adalah 73,066 tahun.



Dengan *roadmap* Angka Harapan Hidup pada periode tahun 2021 – 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.4 Roadmap Angka Harapan Hidup

Tahun	Angka Harapan Hidup
2021	72,53
2022	72,664
2023	72,798
2024	72,932
2025	73,066

Sumber : Badan Pusat Statistik (Diolah dengan proyeksi)

5.3 Pembangunan Keluarga

Pembangunan keluarga dilakukan untuk mencapai kondisi keluarga yang harmonis, sejahtera, dan damai yang siap menghadapi perubahan-perubahan yang sangat cepat. Ketahanan keluarga sasaran pembangunan kependudukan diharapkan dapat menjadi sandaran bagi kelangsungan berkehidupan yang aman, damai, dan sejahtera. Adapun kegiatan untuk setiap periode dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.5 Roadmap Pembangunan Keluarga

Pokok-Pokok	2011-2015	2016-2020	2021-2025	2026-2030	2031-2035
Membangun kualitas keluarga berdasarkan perkawinan yang sah dan bertakwa kepada Ketuhanan Yang Maha Esa	v	v			
Membangun keluarga sejahtera, sehat, maju, mandiri, dengan jumlah anak ideal dalam keharmonisan yang berkeadilan dan kesetaraan gender			v	v	
Membangun keluarga yang berketahanan sosial, memiliki perencanaan sumber daya keluarga, berwawasan nasional dan berkontribusi bagi masyarakat, bangsa dan negara.					v

Sumber : *Grand Design* Pembangunan kependudukan Indonesia Tahun 2011-2035



5.4 Pengarahan Mobilitas Penduduk

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 pasal 33 ayat 1, pengarahannya mobilitas penduduk bertujuan untuk tercapainya persebaran penduduk optimal dan didasarkan pada keseimbangan jumlah penduduk dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan. Mobilitas penduduk meliputi mobilitas internal dan internasional.

Sedangkan berdasarkan pasal 16A Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2009 menegaskan bahwa mobilitas penduduk dilaksanakan secara permanen dan/atau nonpermanen. Mobilitas penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi mobilitas penduduk dalam kabupaten/kota, mobilitas penduduk antarkabupaten/kota dalam provinsi, dan mobilitas penduduk antarkabupaten/kota antarprovinsi. Dan pasal 16B menjelaskan bahwa mobilitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 16A dapat dilakukan atas kemauan sendiri, fasilitas pemerintah, dan/atau fasilitas pemerintah daerah. Pada pasal 16J menegaskan dalam penyelenggaraan pengarahannya mobilitas penduduk, pemerintah daerah provinsi pengumpulan dan analisis data-data mobilitas/persebaran penduduk sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah; pengembangan sistem informasi kesempatan kerja, peluang usaha dan pasar kerja serta kondisi daerah tujuan; pengembangan sistem database dan penertiban pelaksanaan pengumpulan/laporan, pengolahan, analisis data dan informasi yang berkaitan dengan mobilitas penduduk; sosialisasi dan advokasi mengenai kebijakan pengarahannya mobilitas penduduk pada instansi terkait;



komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai kebijakan dan pengelolaan pengarahannya mobilitas penduduk kepada masyarakat; pembinaan dan fasilitasi pengarahannya mobilitas penduduk pada seluruh instansi terkait; pelaporan data statistik mobilitas penduduk; pemantauan dan evaluasi serta pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pengarahannya mobilitas penduduk; pengendalian dampak mobilitas penduduk terhadap pembangunan dan lingkungan.

Selain itu yang perlu diperhatikan dalam mobilitas internal adalah mobilitas permanen dan nonpermanen, mobilitas ke daerah penyangga dan ke pusat pertumbuhan ekonomi baru, penataan persebaran penduduk melalui kerja sama antardaerah, kebijakan urbanisasi, serta penyebaran penduduk ke daerah perbatasan antarnegara, daerah tertinggal, dan pulau-pulau kecil terluar (Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 pasal 33 ayat 3).

Selanjutnya, pengarahannya mobilitas penduduk dilakukan menggunakan data dan informasi serta persebaran penduduk yang memerhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), di samping juga pengembangan sistem informasi kesempatan kerja yang memungkinkan untuk melakukan mobilitas ke daerah tujuan sesuai kemampuan yang dimilikinya (Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 pasal 36 ayat 2).

Sebagai arahan kebijakan, berikut adalah pokok-pokok *Roadmap Grand Design* Pengarahannya Mobilitas Penduduk 2011-2035.

**Tabel 5.6 Roadmap** Pengarahan Mobilitas Penduduk

Pokok-Pokok	2011-2015	2016-2020	2021-2025	2026-2030	2031-2035
1. Pembangunan dan pengembangan kawasan pedesaan menjadi sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam yang mempunyai keterikatan fungsional dan hierarki keruangan dengan pusat-pusat pertumbuhan	V				
2. Peningkatan kerja sama pembangunan antardaerah (desa-kota, kota-kota, antarprovinsi)	V				
3. Peningkatan pelayanan investasi	V				
4. Pengembangan kegiatan usaha berbasis komoditas unggulan dan kebutuhan pasar		V			
5. Peningkatan kualitas SDM dengan memprioritaskan pada penduduk setempat dan pekerja migran untuk menjadi wirausahawan yang handal dan pekerja yang kompeten		V			
6. Pemodelan rekayasa sosial bagi integrasi antara penduduk pendatang dan penduduk asli dalam berbagai bidang kehidupan sosial dan ekonomi			V		
7. Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan			V		
8. Peningkatan infrastruktur intra dan antar wilayah			V		
9. Pengarahan gerak keruangan penduduk dengan mengadopsi visi jangka panjang untuk tata ruang urban demi perencanaan penggunaan lahan yang lestari dan mendukung strategi urbanisasi secara terpadu				V	
10. Pengarahan dan fasilitasi gerak keruangan penduduk yang terpaksa pindah				V	
11. Reviu menyeluruh untuk memperkirakan dampak positif dan negatif kebijakan migrasi (lalu lintas penduduk)				V	
12. Penyiapan SDM yang kompeten berstandar internasional merupakan kebutuhan mutlak sejak dari dunia pendidikan hingga ke/dan selama di dunia kerja, dan merupakan salah satu alat perlindungan utama dalam hubungan kerja					V
13. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik					V
14. Penguatan peran dan kapasitas elemen masyarakat sipil dan pengembangan permodelan pengelolaan kebijakan pengarahannya penduduk					V

Sumber : *Grand Design* Pembangunan kependudukan Indonesia Tahun 2011-2035

5.5 Pembangunan Sistem Data dan Informasi Kependudukan

Pembangunan sistem data dan informasi kependudukan mengacu pada *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Indonesia, dimana pada prinsipnya roadmap pembangunan data dan informasi kependudukan dibagi menjadi lima periode. Setiap periode merupakan penahapan yang sangat terkait dengan pencapaian tujuan dari perkembangan data dan informasi kependudukan yaitu menciptakan suatu sistem yang terintegrasi, mudah diakses dan menjadi bagian dari *Decision Support System* (DSS). Adapun tahapannya adalah sebagai berikut Roadmap Pembangunan Database Kependudukan.

Tabel 5.7 Roadmap Pembangunan Sistem Data dan Informasi Kependudukan

Pokok-Pokok	2011-2015	2016-2020	2021-2025	2026-2030	2031-2035
Periode konsolidasi ke dalam dan tertib administrasi kependudukan	V				
Periode pelayanan prima administrasi kependudukan		V			
Periode pengembangan masyarakat berbasis pengetahuan (<i>knowledge-base society</i>)			V		
Periode integrasi data dan informasi kependudukan dari berbagai sumber ke dalam suatu database yang dapat diakses oleh berbagai pihak yang memerlukan				V	
Periode peningkatan pendayagunaan data dan informasi kependudukan sebagai DSS (<i>Decision Support System</i>)					V

Sumber : *Grand Design* Pembangunan kependudukan Indonesia Tahun 2011-2035

Saat ini sedang memasuki periode kedua yaitu periode pelayanan prima administrasi kependudukan, setelah melewati periode pertama dengan fokus konsolidasi ke dalam dan tertib administrasi kependudukan. Pada periode ke dua ini diharapkan dapat tercapai pelayanan administrasi kependudukan yang prima dengan cara menyiapkan sumber daya manusia yang terlatih dalam hal



pelayanan administrasi kependudukan dan juga dalam bidang teknologi informatika dalam mendukung adanya sistem data dan informasi kependudukan.



BAB 6

PENUTUP



BAB 6

PENUTUP

Dalam konteks kependudukan, Kabupaten Mojokerto merupakan kabupaten yang memiliki kepadatan penduduk terpadat kedua di Jawa Timur dengan penduduk sekitar 1,1 juta jiwa. Tidak hanya itu, laju pertumbuhan penduduk pada periode tahun 2016 – 2019 pertumbuhannya relatif tinggi rata-ratanya pada kisaran 2,28%. Jika dibiarkan terus menerus maka penduduk Kabupaten Mojokerto akan semakin membeludak. Hal ini harus diimbangi dengan pengendalian penduduk Kabupaten Mojokerto dengan program Keluarga Berencana.

Selain itu kualitas penduduk Kabupaten Mojokerto juga perlu diperhatikan, masalah yang harus diperhatikan pada kualitas penduduk Kabupaten Mojokerto adalah pada rata-rata lama sekolah di Kabupaten Mojokerto masih pada angka 8,49 dimana artinya jika dikonfersikan rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas rata-rata belum lulus sekolah menengah pertama. Sehingga perlunya upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan dan juga dibarengi dengan peningkatan fasilitas pendidikan di sekolah-sekolah Kabupaten Mojokerto.

Dalam permasalahan pembangunan penduduk dapat diketahui bahwa masih ada penduduk Kabupaten Mojokerto yang termasuk pada kategori keluarga pra sejahtera, dimana persentase keluarga pra sejahtera di Kabupaten Mojokerto berkisar pada 20%. Hal ini perlu diatasi agar angka keluarga pra



sejahtera nilainya semakin berkurang dan keluarga di Kabupaten Mojokerto semakin sejahtera. Maka dari itu salah satu cara untuk mengatasi hal tersebut adalah adanya program UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera).

Persoalan lain yang masih menjadi kendala dalam pembangunan kependudukan adalah tidak tersebarnya mobilitas penduduk secara merata. Lebih banyak penduduk yang terkonsentrasi di daerah perkotaan atau daerah dekat dengan pusat pemerintahan. Ketidakmerataan ini secara tidak langsung berdampak kepada lambatnya perkembangan ekonomi antar daerah. Dari aspek mobilitas penduduk, kondisi yang diinginkan adalah terjadinya persebaran penduduk yang lebih merata dan pengaturan mobilitas sesuai dengan potensi daerahnya. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mencegah mobilitas ke wilayah perkotaan adalah dengan melakukan pemerataan pembangunan terutama di daerah pedesaan dan juga menyiapkan pelayanan publik di setiap kecamatan utamanya yang termasuk wilayah pedesaan.

Sebagai penopang komponen kependudukan di atas adalah tersedianya sistem data dan informasi kependudukan yang memadai. Saat ini telah ada sistem database kependudukan Kabupaten Mojokerto, namun sistem tersebut perlu dilakukan perbaikan dan updating sesuai dengan kebutuhan dan mengikuti perkembangan jaman. Sehingga diharapkan dengan adanya database kependudukan ini dapat diperoleh data dan informasi kependudukan yang andal, akurat, riil, dan dapat digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan secara cepat.



DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Mojokerto. 2020. *Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Mojokerto Tahun 2019*. Mojokerto : BPS Kabupaten Mojokerto
- _____. 2020. *Kabupaten Mojokerto Dalam Angka*. Mojokerto : BPS Kabupaten Mojokerto
- Bappeda Kabupaten Mojokerto. 2019. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2021*. Mojokerto : Bappeda Kabupaten Mojokerto
- Bappenas. 2017. *Outlook Pembangunan Indonesia 2018 : Pemanfaatan Bonus Demografi*. Jakarta Pusat : Kementerian PPN/Bappenas
- Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. 2012. *Grand Desain Pembangunan Kependudukan Tahun 2011-2035*. Jakarta : Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat



KAB. MOJOKERTO

DP2KBP2

Kabupaten Mojokerto

Jl. R.A Basuni No. 19, Kec. Sooko
Kab. Mojokerto, Jawa Timur 61361